

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN WIDYAPRAJA

SUSUNAN KEPENGURUSAN
JURNAL WIDYAPRAJA IPDN
(Keputusan Rektor IPDN No. 481.2–367
dan No. 800 - 368 Tahun 2016)

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH., MH., MS.

Redaktur:

Prof. Dr. Wirman Syafri, M.Si.

Penyunting/Editor:

Prof. Dr. Edward M. Hutagalung, SH., M.Hum.

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH., MH., MS (IPDN)

Prof. Dr. Wirman Syafri, M.Si (IPDN)

Dr. Yudi Rusfiana, S.IP., M.Si (IPDN)

Dr. Eko Budisantoso, MT (IPDN)

Dr. Widyanarto, M.Si (Unpad)

Desain Grafis:

Dr. Yudi Rusfiana, M.Si

Fotografis:

Drs. H. R. Tomtom Utama, GS, M.Si

Sekretariat:

Achmad Sobari, SE.

Enda Suhenda, S. Sos.

Dedah Juabedah, S.Sos.

Istiningsih, S. Sos.

Rudi Riky Ramdani, SE.

Redaksi Widyapraja

Kampus IPDN Cilandak

Jl. Ampera Raya Cilandak

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560

Telp./Fax.: 021 782 1843

e-mail: jurnalwidyaprajaipdn@yahoo.com
andi_pro23@yahoo.com

PENGANTAR REDAKSI

Para pembaca yang terhormat, dalam kesempatan ini *Jurnal Widyapraja* kembali terbit dalam Ilmu Pemerintahan baik mencakup konsep maupun dari hasil penelitian. Konsep dan hasil penelitian ini merupakan pengembangan dan pendalaman dari berbagai studi yang dikaji secara khusus dalam bidang administrasi pemerintahan.

Terbitnya *Jurnal Widyapraja* Volume XLII No. 2 Tahun 2016 ini, merupakan bukti komitmen Lembaga Penelitian IPDN dalam mengembangkan kajian-kajian pemerintahan melalui media publikasi ilmiah ilmu pemerintahan. *Jurnal Widyapraja* ini diharapkan sebagai media akademik untuk mengakomodasi hasil penelitian ilmiah dan hasil kajian teoretis yang aktual serta inovatif bagi masyarakat ilmu pemerintahan, dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat pemerintahan.

Harapan redaksi bahwa materi yang disajikan dalam edisi *Jurnal Widyapraja* kali ini dapat menambah bahan bacaan para pembaca tentang berbagai konsep dan hasil penelitian dalam lingkup kajian ilmu dan praktik Pemerintahan.

Kami menyadari bahwa materi yang disajikan dalam edisi *Jurnal Widyapraja* ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik dari aspek substansi dan teknis, untuk itu redaksi sangat terbuka adanya masukan yang bersifat konstruktif dari segenap pembaca dan masyarakat pemerintahan demi penyempurnaan jurnal untuk edisi yang akan datang.

Selamat membaca!

Teriring salam

Redaksi

PENGARUH KOORDINASI TERHADAP EFEKTIVITAS PENERTIBAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) PABRIK DI KAWASAN TIMUR KABUPATEN BANDUNG (STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BANDUNG)

Oleh: **Anya Risnawati Soerya Putri**
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstract

Background problem in this research is not yet effectively curbing IPAL factory in Eastern Kabupaten Bandung. Based on the phenomenon, researchers suspect that the issue is affected by the variable coordination. Based on these problems, formulation of the problem posed is: „the influence of coordination against the effectiveness of curbing Waste water management Plant Installations in Eastern Kabupaten Bandung“.

Analysis of problem of research done using theory approach to coordination of Erliana and Eviany (2014: 44) defines coordination is an attempt to synchronize, balancing and directs the parties concerned to be able to integrate perception together in an activity to achieve common interests.

The methods used in this research is a survey method eksplanatif (explanatory survey method) while the source data collection using the study of librarianship and field studies that include: the now, observation, and interviews. Sample withdrawal technique used is a simple random sample (Simple Random Sampling). As for the data analysis technique used is a simple linear regression.

Based on the results of the data processing is done the results obtained indicate the existence of a positive and significant relationship between coordination against the effectiveness of curbing IPAL factory in Eastern Kabupaten Bandung. Thus the hypothesis presented in this research tested the empirical basis.

Keywords: coordination, effectiveness, IPAL

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap industri maupun instansi/badan usaha harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatannya. Limbah cair dari industri berbasis organik mempunyai potensi pencemaran yang sangat berat terhadap lingkungan, terutama pada produk olahan/ bahan baku industri makanan dan minuman. Bahan bawaan yang terkandung didalamnya merupakan bahan-bahan yang sangat kompleks baik yang terlarut maupun yang tidak larut.

Sektor industri tekstil yang kian berkembang seiring dengan perkembangan zaman cenderung menimbulkan permasalahan baru bagi kawasan disekitarnya. Kompleksitas masalah yang ditimbulkan oleh adanya industri tekstil tersebut diantaranya mengenai pembuangan dri limbah tekstil tersebut.

Pencemaran air merupakan salah satu pencemaran berat yang ada di Indonesia dan limbah sektor perindustrian merupakan sumber pencemaran air yang dominan. Disamping sektor perindustrian, pencemaran air ini juga ditimbulkan di sektor-sektor yang lain seperti pertambangan, pertanian dan rumah tangga. Akibat dari pencemaran air tersebut adalah menurunnya kadar kualitas air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dengan adanya industrialisasi yang pesat maka permasalahan pencemaran

air telah mencapai tingkat yang mengelisahkan. Pencemaran air telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, sudah sering adanya kematian disebabkan oleh air yang tercemar. Air limbah harus mengalami proses daur ulang sehingga dapat dipergunakan lagi atau dibuang ke lingkungan tanpa menyebabkan pencemaran.

Limbah pabrik tekstil memiliki kadar warna dan COD yang cukup tinggi karena sebagian besar limbah yang dihasilkan berupa campuran dari bahan-bahan organik sebagai produk samping dari proses produksi. Pewarnaan dan pembilasan menghasilkan air limbah yang berwarna dengan COD (*Chemical Oxygen Demand*) tinggi dan bahan-bahan lain dari zat warna yang dipakai. COD adalah jumlah oksigen yang diperlukan agar bahan buangan yang ada dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi. Dari hal tersebut diketahui bahwa zat organik tersebut berbahaya bagi makhluk hidup sehingga dibutuhkan oksigen untuk mengoksidasi zat organik tersebut agar aman bagi makhluk hidup. Bila kandungan COD semakin tinggi dapat disimpulkan semakin berat pula zat organik yang terkandung dalam limbah tersebut. Buangan air limbah industri mengakibatkan timbulnya pencemaran air sungai yang dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai. Selain itu, pencemaran industri juga berdampak buruk bagi lahan pertanian produktif dan dapat menurunkan kualitas tanah maupun kualitas produk pertanian. Dampak pencemaran air mempunyai nilai (biaya) ekonomis, disamping nilai ekologis, dan sosial budaya.

Fenomena pencemaran limbah industri mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup akan terus berlanjut, jika komitmen dasar industri-industri tekstil nasional tetap mengedepankan dan memperhitungkan nilai keuntungan ekonomi semata, tanpa memperdulikan pencemaran limbah industrinya. Beberapa tahapan proses di dalam industri tekstil dikenal banyak membawa masalah terhadap lingkungan, karena menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan selama proses produksi. Pencemaran lingkungan hidup akibat buangan limbah industri tekstil, akan mengganggu kehidupan masyarakat dan dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup secara berkesinambungan.

Wilayah Timur Kabupaten Bandung yakni Kecamatan Rancaekek, Cicalengka, Cikancung dan Majalaya dan Solokan Jeruk, secara historis merupakan sentra lumbung padi untuk Kabupaten Bandung. Namun, akhir-akhir ini petani di daerah tersebut banyak yang mengeluh akibat lahannya tidak dapat ditanami padi lagi. Hasil gabah menurun, ikan dan ternak banyak yang mati akibat mengkonsumsi air saluran atau sungai. Tidak dapat dipungkiri dengan berkembangnya wilayah tersebut menjadi daerah industri dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya biaya-biaya sosial yang akan ditanggung dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan data yang di peroleh dari BPLHD jumlah industri di kawasan Timur Kabupaten Bandung dari kelima Kecamatan tersebut terdapat 105 industri tekstil berskala besar dan kecil. Dampak dari limbah industri yang terjadi di Kecamatan Majalaya membuat warga sekitar sungai Citarum tak punya pilihan kecuali menggunakan air yang tercemar. Sungai Citarum yang melintasi Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selama bertahun-tahun menjadi tempat buangan limbah pabrik tekstil. Sedikitnya 16 pabrik menggelontorkan limbah kimia langsung ke sungai. Hal itu biasanya dilakukan pada malam hari untuk mengelabui pemantau. Apabila satu pabrik mengeluarkan 400 meter kubik saja per hari, ada 6.400 meter kubik limbah di Sukamaju, belum lagi di kawasan industri lain di Kabupaten Bandung. Pertumbuhan ekonomi kawasan Rancaekek mulai bergeser sejak dimulainya pengembangan industri tekstil di Kabupaten Sumedang yang membutuhkan air, dan menimbulkan pencemaran di kawasan Rancaekek karena beban pencemaran air sudah melebihi daya tampung Sungai

Cikijing yang berhulu di Kabupaten Sumedang dan berhilir di Kabupaten Bandung. Wilayah Rancaekek terdiri dari Kecamatan Rancaekek di Kabupaten Bandung dan Kecamatan Cikeruh di Kabupaten Sumedang. Secara morfologis wilayah Rancaekek merupakan hamparan yang lebih rendah dari daerah sekitarnya, sedangkan secara hidrologi wilayah Rancaekek di Kabupaten Bandung bergantung kepada keberadaan air dari Kabupaten Sumedang.

Sedikitnya 22 pabrik yang ada di sekitar wilayah Rancaekek-Cicalengka masuk ke Sungai Cikijing tanpa ada pengolahan terlebih dulu, Persoalan itu juga mengakibatkan lebih dari 400 hektare lahan pertanian di empat desa di Kecamatan Rancaekek hingga saat ini tercemar limbah cair, yaitu Desa Jelegong 150 ha (milik 838 orang), Linggar 109 ha (milik 236 orang), Sukamulya 40 ha, dan Desa Bojongloa seluas 118 ha. Akibatnya, produksi padi di wilayah itu mengalami penurunan. Tingkat produksi gabah kering panen (GKP), saat ini antara 0,5-0,6 ton/ha. Padahal dalam kondisi normal dan tidak tercemar limbah cair, produksi GKP berkisar 6,5 – 8,4 ton/ha. Hal itu menyebabkan kerugian material rata-rata Rp 2,2 juta/ton. Sungai-sungai juga telah tercemar beberapa logam berat dan menyebabkan ikan-ikan mati. Air tanah di kawasan industri Cicalengka juga diduga sudah tercemar logam berat, Merkuri dan Krom.

Masyarakat mengeluhkan pencemaran pada Sungai Cikijing dan sawah yang terjadi di 4 desa, yaitu desa Jelegong, Bojongloa, Linggar dan Sukamulya Kecamatan Rancaekek yang diduga disebabkan oleh pembuangan air limbah dari kegiatan industri yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sumedang, yaitu: PT. KHT-II, PT. ISIT dan PT. FST. Perkiraan luas lahan tercemar di Kecamatan Rancaekek seluas 752 ha dari total luas lahan baku sawah 983 ha.

Keluhan masyarakat berupa adanya pencemaran air permukaan dan air tanah yang merupakan sumber air bersih bagi penduduk setempat. Pada tanah yang tercemar mengakibatkan produktivitas padi menjadi rendah, dari 6 – 7 ton/ha menjadi hanya 1 – 2 ton/ha (Hasil penelitian Balai Penelitian Tanah Bogor, 2003). Diduga penurunan kualitas air Sungai Cikijing akibat pembuangan air limbah dan sludge IPAL PT. KHT-II, PT. ISIT dan PT. FST.

Langkah awal Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengatasi masalah pencemaran yang disebabkan oleh industri, secara teknis operasional berkaitan dengan teknis pengendalian pembuangan limbah ke air menjadi tanggung jawab BPLHD, dalam hal ini BPLHD harus berkoordinasi dengan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPPM). Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi (SDAPE) yaitu instansi yang terlibat dalam pengendalian pencemaran air, khususnya dalam verifikasi lapangan atas permohonan izin pembuangan air limbah sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki kewenangan mengeluarkan izin bagi industri. Hal ini berkaitan dengan Permenperin Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, dimana dalam pengembangan kawasan industri, pengelola kawasan industri wajib melaksanakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, di mana kawasan industri wajib dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Apabila jenis-jenis industri yang akan berlokasi di dalam kawasan industri berpotensi limbah cair, maka wajib dilengkapi dengan IPAL terpadu yang biasanya mengolah empat parameter kunci yaitu BOD, COD, pH dan TSS. Maka menurut Permenperin Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, pengelola wajib menetapkan standar influent yang boleh dimasukkan ke dalam IPAL terpadu dan parameter limbah cair lain atau kualitas atas 4 parameter kunci tersebut jauh di atas standar influent, maka wajib dikelola terlebih dahulu (pre treatment) oleh masing-masing pabrik.

Pemerintah Kabupaten Bandung dalam rangka mengefisienkan biaya proses produksi bagi para pengusaha industri sehingga mampu meminimalkan limbah buangan industri dan upaya pengendalian pencemaran air limbah industrinya melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hasil observasi, penulis melihat bahwa penertiban IPAL di Kawasan Timur Kabupaten Bandung belum optimal. Untuk lebih jelasnya penulis sajikan dalam data tabel berikut ini:

Tabel 1

Data Industri di Kawasan Timur Kabupaten Bandung pada Tahun 2014 dan 2015

No	Tahun	Kecamatan	Jumlah Industri	Taat IPAL	Tidak Taat IPAL
1.	2014	1. Rancaekek	16	6	10
		2. Cicalengka	3	2	1
		3. Cikancung	4	2	2
		4. Majalaya	56	50	6
		5. Solokanjeruk	1	1	0
		Jumlah	80	61	19
2.	2015	1. Rancaekek	22	7	15
		2. Cicalengka	3	2	1
		3. Cikancung	8	2	6
		4. Majalaya	70	58	12
		5. Solokanjeruk	2	1	1
		Jumlah	105	70	35

Sumber: Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2015

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir yakni dari tahun 2014 s.d. 2015 perusahaan industri di Kawasan Timur Kabupaten Bandung dalam penertiban instalasi pengolahan air limbah (IPAL) belum efektif. Dimana dari beberapa jumlah industri di 5 (lima) kecamatan yang berada di kawasan Timur Kabupaten Bandung masih banyak yang tidak taat IPAL.

Pencemaran terhadap air biasanya diakibatkan oleh perusahaan yang membuang limbah cairnya masih di atas rata-rata baku mutu yang telah ditetapkan. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yakni:

1. Akibat Instalasi Pengolahan Air Limbah yang pengoperasiannya kurang optimal, sehubungan biaya untuk mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah cukup tinggi.
2. Masih ditemukan perusahaan yang membuang limbah cairnya tanpa diolah terlebih dahulu oleh Instalasi Pengolahan Air Limbah secara diam-diam.
3. Ada beberapa industri yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, peneliti merumuskan beberapa indikasi-indikasi lainnya yang memperlihatkan belum efektifnya penertiban IPAL pabrik pada kawasan industri di kawasan Timur Kabupaten Bandung antara lain:

1. Kesadaran para pengusaha industri akan pentingnya IPAL masih kurang

2. Masih terdapat industri yang belum memiliki dokumen perijinan apapun dan/atau dokumen lingkungan.
3. Belum optimalnya sistem kinerja Instalasi Pengelolaan Air Limbah di Kawasan Timur Kabupaten Bandung
4. Beberapa perusahaan Industri belum memenuhi persyaratan cara pembuangan air limbah
5. Pemeriksaan tes laboratorium belum dilaksanakan secara periodik bagi industri yang mengeluarkan limbah.
6. Program pembinaan dan pengawasan yang intensif untuk meningkatkan penataan secara signifikan bagi para pengusaha industri masih rendah.
7. Pelaporan pengendalian air dari penataan administrasi dan ketentuan teknis banyak dilanggar oleh para pengusaha industri
8. Jeratan hukum bagi para pengusaha yang melakukan pelanggaran masih longgar

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang penelitian tersebut di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Seberapa Besar Pengaruh Koordinasi Terhadap Efektivitas Penertiban Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) pabrik di Kawasan Timur Kabupaten Bandung”.

TINJAUAN TEORITIS

Erliana dan Eviany (2014:44) mendefinisikan koordinasi adalah “sebagai usaha dalam mensinkronisasikan, menyeimbangkan dan mengarahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat secara bersamaan-sama menyatukan persepsi dalam suatu kegiatan untuk mencapai kepentingan bersama”.

Menurut Erliana dan Eviany (2014:49) fungsi-fungsi koordinasi ada 7, yaitu:

1. Fungsi manajemen. Koordinasi dalam pelaksanaannya berfungsi sebagai salah satu fungsi manajemen yakni disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan, perlu adanya fungsi mengarahkan agar setiap unit-unit yang berbeda wewenang tersebut dapat saling bersinergis guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan maupun yang baru akan ditetapkan;
2. Koordinasi berfungsi untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam dan luar organisasi;
3. Koordinasi berfungsi untuk mengarahkan dan menyatukan kegiatan dari satuan kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan;
4. Koordinasi berfungsi sebagai faktor dominan yang perlu diperhatikan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi.
5. Koordinasi berfungsi memainkan peranan penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab;

6. Pertumbuhan organisasi berarti penambahan beban kerja atau fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh organisasi yang bersangkutan.
7. Koordinasi berfungsi memancing tumbuhnya spesialisasi sebagai konsekuensi logis daripada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diperhatikan oleh organisasi dengan harapan para spesialis ini akan mampu memainkan peranan yang tidak lepas kaitannya dengan hal-hal yang lebih umum dan lebih luas dalam pencapaian tujuan organisasi.

METODE YANG DIGUNAKAN

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan metode survey eksplanatif (*explanatory survey method*) yaitu suatu metode penelitian survey yang bertujuan untuk meneliti hubungan/relasi antar variabel yang ada dalam hipotesis. Dengan menggunakan metode penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan serta menganalisis masalah masalah yang dihadapi dalam koordinasi serta pengaruhnya terhadap penertiban IPAL di kawasan Timur Kabupaten Bandung.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *simple random sampling* dengan penentuan besaran sampel menggunakan rumus dari Slovin dalam Sevilla (1993:161) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Di mana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir/diinginkan yaitu 10%

Berdasarkan rumus tersebut didapat jumlah sampel sebanyak:

$$n = \frac{155}{1 + 155 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{155}{1 + 1,55}$$

$$n = 60,78 \text{ orang}$$

dibulatkan = 61 orang

Proporsi sampel pada setiap unit populasi ditetapkan dengan menggunakan teknik *disproportionated stratified random sampling* mengingat unsur populasi berstrata tetapi tidak proporsional dalam jumlah.

Tabel 2
Besaran sampel untuk setiap unsur populasi

No.	Unsur	Jumlah	Keterangan
1.	BPLHD Kabupaten Bandung $11/155 \times 61 \text{ orang} = 4,32 \text{ orang}$	4 orang	Unsur Aparat
2.	BPMP Kabupaten Bandung $10/145 \times 59 \text{ orang} = 3,93$	4 orang	
3.	Bappeda Kabupaten Bandung $10/155 \times 61 \text{ orang} = 3,93$	4 orang	
4.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan $10/155 \times 61 \text{ orang} = 3,93$	4 orang	
5.	Dinas SDAPE $9/155 \times 61 \text{ orang} = 3,54$	4 orang	
6.	Pengusaha Industri	41 orang	Unsur Swasta
Jumlah ukuran Sampel (n)		61 orang	

ANALISIS

1. Analisis Koordinasi Terhadap Efektivitas Penertiban Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kawasan Timur Kabupaten Bandung (X)
 - a. Koordinasi Melalui Kewenangan.

Melalui hasil kategorisasi jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap dua butir pernyataan yang diajukan termasuk dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi melalui kewenangan belum optimal dilaksanakan.
 - b. Koordinasi melalui konsensus.

Melalui hasil kategorisasi jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap tiga butir pernyataan yang diajukan mengenai dimensi koordinasi melalui konsensus termasuk dalam kategori sedang.
 - c. Dimensi Koordinasi Melalui Pedoman Kerja.

Melalui hasil kategorisasi jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap dua butir pernyataan yang diajukan mengenai koordinasi melalui pedoman kerja dalam kategori sedang.
 - d. Dimensi Koordinasi Melalui Forum.

Melalui hasil kategorisasi jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap empat butir pernyataan yang diajukan mengenai koordinasi melalui forum termasuk dalam kategori sedang.
 - e. Dimensi Koordinasi Melalui Konferensi.

Melalui hasil kategorisasi jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap dua butir pernyataan yang diajukan mengenai koordinasi melalui konferensi termasuk dalam kategori sedang
2. Efektivitas Penertiban Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kawasan Timur Kabupaten Bandung (Y)

a. Prosedural

Melalui hasil kategorisasi jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap empat butir pernyataan yang diajukan mengenai dimensi procedural termasuk dalam kategori rendah.

b. Tujuan/Hasil

Melalui hasil kategorisasi jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap tiga butir pernyataan yang diajukan mengenai dimensi tujuan termasuk dalam kategori sedang.

c. Monitoring dan Evaluasi

Melalui hasil kategorisasi jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap empat butir pernyataan yang diajukan mengenai dimensi monitoring dan evaluasi termasuk dalam kategori sedang.

3. Pengaruh Koordinasi Terhadap Efektivitas Penertiban Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kawasan Timur Kabupaten Bandung

Pengaruh yang kuat antara variabel koordinasi dengan efektivitas penertiban IPAL pabrik di kawasan Timur Kabupaten Bandung serta pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada efektivitas penertiban IPAL pabrik di kawasan Timur Kabupaten Bandung tidak terlepas kaitannya dengan koordinasi dalam mengelola perilaku tugas dan hubungan dengan institusi maupun para pelaku industri sebagai sasaran program yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian dimensi koordinasi melalui kewenangan termasuk dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi melalui kewenangan belum optimal dilaksanakan. Berdasarkan wawancara dengan pimpinan BPLHD Kabupaten Bandung diketahui bahwa terdapat banyak kendala untuk mewujudkan koordinasi yang efektif dalam penertiban IPAL pabrik. Kendala yang dihadapi antara lain bahwa institusi yang terlibat tidak bersifat seragam atau mempunyai keanekaragaman jenis dan fungsi. Permasalahan penertiban IPAL pabrik pada institusi lain diluar BPLHD hanya merupakan sub system dari seluruh system pelaksanaan tugas pokok organisasi secara keseluruhan sehingga tidak mendapatkan perhatian yang terfokus. pemerintah Kabupaten Bandung terus melakukan berbagai upaya perbaikan kondisi sanitasi di Kabupaten Bandung. dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-607/Kep/Bangda/2012 tentang Penetapan Kabupaten atau Kota Sebagai Peserta Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2013, Kabupaten Bandung resmi tergabung dalam Program PPSP Tahun 2013. Sebagai tahap awal untuk menciptakan perbaikan kondisi sanitasi di Kabupaten Bandung, termasuk kedalamnya pengelolaan IPAL, Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Bandung melakukan pemetaan kondisi sanitasi eksisting. Pemetaan tersebut di anggap perlu dan penting dilakukan sebagai patokan untuk menentukan parameter sejauh mana upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sanitasi Kabupaten Bandung sehingga dapat sesuai target yang ditetapkan. Baik itu target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMP) Jawa Barat, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun dengan target MDGs di sektor sanitasi. Berdasarkan hasil wawancara maupun observasi yang peneliti lakukan

menunjukkan bahwa sekalipun banyak pabrik yang telah memiliki IPAL namun lebih dari 60% perusahaan membuang limbah langsung ke sungai. Kondisi ini menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan dan pengoperasian IPAL tidak dipatuhi oleh para pengusaha tersebut. Hal ini terjadi di kawasan Majalaya, Rancaekek dan Solokan Jeruk sehingga daerah hulu sungai Citarum dan sungai Cimande dan Cikijing yaitu anak sungai Citarum yang telah terkontaminasi dengan parah. Air sungai selama 24 jam berwarna warni dengan kandungan racun yang berbahaya. Begitu pula yang terjadi di daerah Cisirung Dayeuhkolot.

SIMPULAN

- Hasil pengujian hipotesis melalui perhitungan regresi linier sederhana menunjukkan bahwa koordinasi melalui kewenangan, koordinasi melalui konsensus, koordinasi melalui pedoman kerja, koordinasi melalui forum dan koordinasi melalui konferensi dengan institusi lain yang belum optimal menyebabkan belum efektifnya penertiban IPAL di wilayah timur Kabupaten Bandung.
- Pengaruh yang kuat antara variabel koordinasi dengan efektivitas penertiban IPAL di Kabupaten Bandung serta pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada konsep efektivitas penertiban IPAL di wilayah timur Kabupaten Bandung tidak terlepas kaitannya dengan koordinasi dalam mengelola perilaku tugas dan hubungan antar institusi maupun dengan para pelaku industri di kawasan tersebut.

SARAN

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh koordinasi terhadap efektivitas penertiban IPAL di wilayah timur Kabupaten Bandung, dapat peneliti mengajukan saran yaitu:

- Dalam menangani masalah penertiban IPAL di harapkan BPLHD Kabupaten Bandung dapat lebih meningkatkan koordinasi dengan *stake holder* yang terkait dalam pelaksanaan penertiban IPAL dengan memadukan program-program yang selaras sehingga setiap *stake holder* yang terkait dapat melakukan tindakan yang sama dalam menangani masalah penertiban IPAL, perlu juga diupayakan pemaksaan kepada para pelaku industri untuk membuat IPAL terpadu dan penegakan hukum setegas-tegasnya kepada para pelanggar IPAL dengan adanya peningkatan penegakan hukum lingkungan baik preventif dan represif (sanksi pidana). Terjalannya koordinasi dan pembagian wewenang yang jelas oleh SKPD, Camat dan Kepala Desa dan juga melakukan recovery sistem termasuk *review* perubahan tata ruang, kemudian reformasi birokrasi berupa penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) diharapkan juga dapat menjadi acuan untuk bisa menanggulangi kecurangan para pengusaha industri di kawasan Timur Kabupaten Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Hasan, Erliana dan Eva Eviany. 2014. *Komunikasi Dalam Koordinasi Pemerintahan*.
Faisal, Sanafiah. 1992. *Penelitian Kualitatif, Dasar dan Aplikasi*; Jakarta: Radjawali Press

- Gibson et al, 1996. *Organisasi Perilaku Struktur Proses*. Jakarta: Binarupa Aksara
- Handayani, Soewono, 1996. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Gunung Agung.
- Hasan, Erlina dan Eva Eviany. 2014. *Komunikasi Dalam Koordinasi Pemerintahan*
- Hasibuan, Malayu S.P., 2001. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2007. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hersey, Ralph.E, Blanchard, Kenneth and Johnson, Dewey.F. 1996. *Management of Organizational Behavior*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Moekijat, 1994. *Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis*. Bandung: Mandar Madju
- Moleong, J.Lexy, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S, 1988, *Metode penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Noeng, Muhadjir, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarakin
- Robbins, Stephen P, 1996, *Organizational Behavior*. New Jersey: Prentice Hall, Inc A Simon & Schuster Company, Englewood Cliffs.
- Stoner, James A.F Freeman, R Edward. 1996. *Manajemen Jilid I dan II, alih bahasa Alexander Sindoro*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Sugandha. 1991. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak administrasi*. Jakarta: Pradaya.
- Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Stoner, James, AF. And Wankel, 1996, *Management (Third Edition)*. London: Prentice Hall International Inc.

Dokumen dan Sumber Lain

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2002 *Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung*
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 *Tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 *Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air*
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan*
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007–2027*
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2014 *Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015*
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 *Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung*

REFORMASI BIROKRASI DAN INOVASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh: **Marzuki**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus NTB

Abstract

Reform of the bureaucracy associated with the effort to create innovation. In the context of governance, innovation is a revision of the current system and are still in the corridor structure long-term planning. The most important thing in the governance of innovation is always the new things both large and small in the daily bureaucratic practice, so that innovation becomes 'routine' in the new bureaucracy. One role of government is to empower the community. Along with the birth of bureaucratic reform policy, it is expected that the innovation will be born in community empowerment. The research problem is the role of government in the innovation community empowerment in the reform era bureaucracy today. While the purpose of this study was to determine the role of government in the innovation community empowerment in line with the policy of bureaucratic reform. The results showed that community empowerment in the reform era bureaucracy wanted the role of government as advisors, improve the role of professional services into community service. The role of government in that context is the reduction of barriers and obstacles to creativity and participation, increased access to services to support various social and economic activities of society, and develop programs to further enhance the capabilities and allowing the public play an active role in harnessing and utilizing productive resources provided so as to have a high added value in order to improve the welfare of society.

Keywords: *reform of the bureaucracy, innovation, empowering people.*

Abstrak

Reformasi birokrasi berkaitan dengan upaya menciptakan inovasi. Dalam konteks pemerintahan, inovasi adalah revisi atas sistem yang sedang berjalan serta masih dalam koridor struktur perencanaan jangka panjang. Hal terpenting dalam inovasi tata pemerintahan adalah selalu adanya hal-hal baru baik besar maupun kecil di dalam praktek birokrasi keseharian, sehingga inovasi menjadi 'rutinitas' baru di dalam birokrasi. Salah satu peran pemerintah adalah melakukan pemberdayaan masyarakat. Seiring dengan lahirnya kebijakan reformasi birokrasi, maka lahir pula inovasi dalam pemberdayaan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah dalam rangka inovasi pemberdayaan masyarakat di era reformasi birokrasi saat ini. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam rangka inovasi pemberdayaan masyarakat sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di era reformasi birokrasi menghendaki peran pemerintah sebagai pengarah, memperbaiki peran profesional service menjadi community service. Peran pemerintah dalam konteks tersebut adalah pengurangan hambatan dan kendala-kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat, memperluas akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan mengembangkan program untuk lebih meningkatkan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia sehingga memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: reformasi birokrasi, inovasi, pemberdayaan masyarakat.

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi publik yang lebih baik. Latar belakang lahirnya kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia antara lain disebabkan beberapa hal: 1) organisasi pemerintahan belum tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). 2) beberapa peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara masih ada yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, dan multitafsir. Selain itu, masih ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik yang sederajat maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya atau antara peraturan pusat dengan peraturan daerah. 3) manajemen sumber daya manusia aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi. 4) masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan belum mantapnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 5) pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk, dan 6) pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan professional (KemenPAN-RB, 2010a: 16).

Hampir enam tahun sudah gagasan Reformasi Birokrasi (RB) disosialisasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera diimplementasikan. Namun proses implementasi dari gagasan reformasi birokrasi tersebut, belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Sebagian dari masyarakat, terutama yang selama ini memberikan perhatian khusus pada upaya implementasi reformasi birokrasi, beranggapan bahwa reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah “mandek” dalam pelaksanaannya, “kemandekan” itu terindikasi dari masih “gemuknya” organisasi.

Reformasi birokrasi pemerintahan saat ini memang belum sepenuhnya terlihat. Birokrasi pemerintahan masih kental dengan nuansa klasik, yaitu kekuasaan tunggal ada di tangan pemerintah. Selain itu, rancangan besar yang lengkap dan tuntas mengenai penyelenggaraan birokrasi pemerintah belum terlihat. Struktur organisasi pemerintahan bahkan tergolong gemuk, sehingga kegiatan yang dilakukan cenderung boros.

Dalam konteks reformasi birokrasi, inovasi adalah bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini sebagaimana dikemukakan Farazmand (2004:19) bahwa:

Innovation is key to sound governance, and innovation in policy and administration is central to sound governance as well. Without policy and administrative innovations, governance falls into decay and ineffectiveness, loses capacity to govern, and becomes a target of criticism and failure.

Pandangan di atas menjelaskan bahwa inovasi adalah hal sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap pemerintahan. Inovasi sebagaimana dimaksud Farazmand, tidak mesti bersifat revolusioner dan fragmentatif. Dalam level tertentu bisa saja inovasi adalah revisi atas sistem yang sedang berjalan serta masih dalam koridor struktur perencanaan jangka panjang. Hal terpenting dalam inovasi tata pemerintahan adalah selalu adanya hal-hal baru (besar atau kecil) di dalam praktek birokrasi keseharian, sehingga inovasi menjadi ‘rutinitas’ baru di dalam birokrasi.

Inovasi pemerintah, salah satunya dapat dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berlangsung saat ini masih berbasis *problem based*. Padahal ketidakberdayaan masyarakat meliputi segala aspek, selain faktor pendidikan, juga faktor struktural dan

sosial serta kondisi lingkungan dan kebijakan-kebijakan yang kurang kondusif untuk menumbuhkan kreativitas dan produktivitas dan mengembangkan potensi lokal yang ada di masyarakat.

Upaya untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat, melibatkan segenap komponen masyarakat. Diperlukan pula pemimpin yang tidak hanya populis, akan tetapi juga mampu sebagai *leader* maupun manajer dan memiliki kekuatan moral. Pemberdayaan masyarakat perlu mendapatkan inovasi, karena masyarakat sebagai pelaku utamanya harus mampu mengerti potensi mereka dan memerlukan inovasi untuk menjalankan program kegiatan sesuai potensinya tersebut. Inovasi akan mampu mendorong kegiatan dan menjadi solusi bagi pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalahnya adalah bagaimana peran pemerintah dalam rangka inovasi pemberdayaan masyarakat di era reformasi birokrasi saat ini. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah diperoleh gambaran tentang peran pemerintah dalam inovasi pemberdayaan masyarakat di era reformasi. Kajian ini penting dilakukan mengingat pemerintahan sekarang tidak lagi berhadapan dengan masalah dan realitas rutin saja. Apel pagi, rapat-rapat rutin, urusan surat-menyurat dan implementasi prosedur sudah bukan merupakan tugas inti dari sebuah pemerintahan. Inovasi juga harus marak dalam kegiatan-kegiatan operasional dalam pengelolaan organisasi dan manajemen pemerintahan dalam membongkar paradigma lama birokrasi menuju pada pemahaman birokrasi yang lebih dinamis.

Inovasi sebagaimana, tidak mesti bersifat revolusioner dan fragmentatif. Dalam level tertentu bisa saja inovasi adalah revisi atas sistem yang sedang berjalan serta masih dalam koridor struktur perencanaan jangka panjang. Hal terpenting dalam inovasi tata pemerintahan adalah selalu adanya hal-hal baru (besar atau kecil) di dalam praktek birokrasi keseharian, sehingga inovasi menjadi ‘rutinitas’ baru di dalam birokrasi.

Di sisi lain, upaya untuk menata wajah birokrasi di Indonesia kini telah mengalami kemajuan dengan lahirnya kebijakan Reformasi Birokrasi. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang menyatakan bahwa “pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan tatakelola pemerintahan yang baik serta aparatur pemerintah yang bersih di pusat dan di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

Berkaitan dengan latar belakang di atas, penulis mengungkap kajian pustaka yang relevan dengan kajian ini, sebagai berikut:

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi dalam ranah akademik lebih dikenal sebagai ‘reformasi administrasi atau *administrative reform*’. Pada awal berkembangnya teori administrasi, para pakar administrasi menekankan pentingnya efisiensi dalam administrasi. Hal ini dinyatakan Woodrow Wilson dalam Caiden (1969: 32) bahwa:

There should be a science of administration which shall seek to straighten the paths of government, to make its business less unbusinesslike, to strengthen and purify its organization. It is the object of administrative study to discover, first, what government can properly and successfully do, and

secondly, how it can do these proper things with utmost possible efficiency and the least possible cost either of money or of energy.

Pendapat Caiden tersebut menunjukkan bahwa reformasi administrasi diarahkan untuk melakukan transformasi administratif menuju standar kinerja tinggi, meskipun juga memperoleh tantangan dalam proses pelaksanaannya. Namun, untuk mencapai kinerja tinggi, setidaknya melibatkan 3 (tiga) unsur utama, yaitu moral, transformasi, dan resistensi. Tantangan terbesar untuk melakukan transformasi adalah bagaimana merebut hati dan pikiran anggota organisasi pada berbagai level untuk meminimalisir resistensi.

Menurut Thoha (2009), reformasi adalah suatu proses yang tidak bisa diabaikan. Reformasi secara naluri harus dilakukan karena tatanan pemerintahan yang baik pada suatu masa, dapat menjadi tidak sesuai lagi karena perkembangan jaman. Reformasi birokrasi yang mendasar semestinya memberikan perspektif rancangan besar yang akan dilakukan. Perbaikan di satu bidang harus menunjukkan kaitannya dengan bidang yang lain. Apalagi dengan menganut sistem pemerintahan yang demokratis, maka setiap kebijakan publik harus mengakomodasi setiap kebutuhan rakyat.

Gelombang reformasi birokrasi di Indonesia juga didasarkan pada krisis ekonomi pada tahun 1997. Hal ini diuraikan di dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 (Kementerian PAN-RB, 2010:1) bahwa krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997, pada tahun 1998 telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak itu, telah terjadi berbagai perubahan penting yang menjadi tonggak dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi, yang dikenal sebagai reformasi gelombang pertama. Perubahan tersebut dilandasi oleh keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Pandangan di atas menjelaskan bahwa lahirnya reformasi birokrasi merupakan tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar krisis multidimensi yang melanda Indonesia dapat diatasi dengan mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan bersih dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai makna reformasi birokrasi, Rasyid (1998:93-94) menyatakan bahwa: pembaharuan (reformasi) bermakna suatu langkah perubahan tanpa merusak (*to change without destroying*) atau perubahan seraya memelihara (*to change while preserving*) yang diprakarsai oleh mereka yang memimpin suatu sistem”. Pembaharuan politik dan ekonomi adalah langkah-langkah perubahan yang dilakukan atas prakarsa penguasa agar ia bisa lebih efektif menjawab dinamika dan tantangan yang dihadapinya dalam dua bidang itu.

Reformasi berbeda secara diametris dibanding revolusi yang justru diprakarsai dari bawah (rakyat) dan mengambil tempat di luar formasi kekuasaan yang berlaku. Dalam praktek, pembaharuan bisa bermakna restrukturisasi, revitalisasi, dan refungsionalisasi berbagai elemen dari kehidupan politik dan ekonomi. Ia dimaksudkan untuk mereproduksi legitimasi dari sistem yang ada.

Inovasi

Konsep inovasi juga secara umum dapat dipahami dalam konteks perubahan perilaku. Inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Pengertian inovasi sendiri sangat beragam, dan dari banyak perspektif. Menurut Rogers (2003:12), salah satu penulis buku inovasi terkemuka, menjelaskan bahwa inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu (satu unit) tertentu dan diadopsi oleh yang lainnya.

Inovasi sebagai salah satu ciri nilai fleksibilitas organisasi bukan hanya sekedar melakukan sesuatu yang baru, menemukan sesuatu yang baru, atau membawa suatu gagasan yang baru sebagaimana definisi inovasi pada umumnya. Namun menurut Sherwood (2002:2), inovasi sebagai suatu proses memerlukan empat tahapan yakni: (1) tahap pengajuan gagasan yaitu mempunyai ide lebih dahulu; (2) tahap evaluasi terhadap gagasan yang akan ditindaklanjuti; (3) tahap pengembangan yaitu memperbaiki gagasan tersebut dari konsep menjadi realitas yang menghasilkan sesuatu; dan (4) tahap implementasi yaitu mengupayakan gagasan tersebut sungguh-sungguh terwujud.

Kajian inovasi pemerintahan daerah berada dalam lingkup organisasi. Oleh karena itu penting untuk memahami hubungan antara inovasi dan perspektif teori organisasi. Seperti dikutip oleh Lam (2004:3) mengungkapkan bahwa "*organizational creation is fundamental to the process of innovation*". Penciptaan organisasi merupakan dasar utama bagi proses inovasi. Kemampuan dari suatu organisasi untuk berinovasi adalah pra-kondisi keberhasilan dalam memanfaatkan penemuan sumberdaya dan teknologi baru. Sebaliknya, pengenalan teknologi baru sering menyajikan peluang yang kompleks dan tantangan bagi organisasi, yang mengarah ke perubahan dalam praktek manajerial dan munculnya bentuk-bentuk organisasi baru.

Perspektif inovasi dalam organisasi salah satunya dapat dipahami melalui artikel yang dibuat oleh Carol Slappendel yang berjudul *Perspectives on Innovation in Organizations* (1996). Dalam pandangan Slappendel (1996:3) kajian inovasi dalam teori organisasi dapat dilihat dalam tiga perspektif yaitu *the individualist perspective*, *the structuralist perspective*, dan *the interactive process perspective*. Perspektif individu, inovasi dikaitkan dengan individu dan aktor-aktor yang terkait dengan pelaksanaan tugas organisasi. Perspektif struktural, inovasi bertumpu pada pandangan bahwa inovasi hanya bisa dilakukan jika organisasinya berubah, baik prosedur, struktur dan kulturnya. Sedangkan pada perspektif adalah perpaduan antara perspektif individu dan struktural yang bersifat interaktif.

Pervaiz K. Ahmed and Charles D. Shepherd (2010) menjelaskan bahwa inovasi tidak hanya terbatas pada benda atau barang hasil produksi, tetapi juga mencakup sikap hidup, perilaku, atau gerakan-gerakan menuju proses perubahan di dalam segala bentuk tata kehidupan masyarakat. Jadi, secara umum, inovasi berarti suatu ide, produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan praktik-praktik baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan atau diterapkan oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang dapat digunakan atau mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat demi terwujudnya perbaikan mutu setiap individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan.

Inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah bersifat sistemik, inovasi pemerintahan yang ada di tingkat nasional pada dasarnya saling berkaitan dengan inovasi di tingkat regional ataupun di tingkat lokal. Pemahaman ini terasa semakin penting untuk diimplementasikan di Indonesia sebagai suatu negara yang menganut paham negara kesatuan (*unitary state*), karena hubungan antara pemerintah pusat dan daerah adalah bersifat *coordinate* dan sekaligus *subordinate*. Keberadaan

pemerintah daerah adalah merupakan bagian dari pemerintah pusat, sehingga inovasi pemerintahan yang ada di tingkat lokal kendati memiliki kemandirian seharusnya tidak menyimpang dari desain inovasi pemerintahan yang telah ditetapkan di tingkat nasional.

Pemerintah pusat memiliki peran dalam hal desain konsep inovasi kebijakan tingkat nasional (makro) yang akan diimplementasikan di tingkat pusat dan daerah. Desain kebijakan inovatif ini perlu dikomunikasikan dengan berbagai tingkatan pemerintahan agar tujuan inovasi dipahami dan diimplementasikan dengan baik. Desain dan strategi inovasi yang diperlukan adalah dalam hal melaksanakan fungsi mengatur (*policy formulation*) dan mengurus (*policy implementation*) penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam pemanfaatan teknologi yang dapat diimplementasikan pada semua tingkatan pemerintahan. Desain kebijakan yang telah ditetapkan selanjutnya diimplementasikan di tingkat regional (meso) dan di tingkat lokal (mikro) dalam bentuk program dan kegiatan pengelolaan urusan pemerintahan. Makna inovasi implementasi kebijakan ini adalah berkaitan dengan fungsi pengaturan (*policy making*) dan fungsi pengurusan (*policy executing*) di tingkat regional dan di tingkat lokal.

Pemberdayaan Masyarakat

Terminologi pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (*community development*). Pemberdayaan dilahirkan dari Bahasa Inggris yakni *empowerment*, yang mempunyai makna dasar ‘pemberdayaan’, dimana ‘daya’ bermakna kekuatan (*power*). Bryant dan White, (1987) menyatakan bahwa pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuatan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin. Cara dengan menciptakan mekanisme dari dalam (*build-in*) untuk meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adil, yakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh.

Pemerintah sebagai ‘agen perubahan’ dapat menerapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin dengan tiga arah tujuan, yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. *Enabling* maksudnya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. *Empowering*, bertujuan untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, yakni dengan menampung berbagai masukan dan menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan. *Protecting*, artinya melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur yang penting. Dengan sudut pandang demikian, maka pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi.

Dalam prakteknya seringkali terminologi tersebut saling tumpang tindih, saling menggantikan dan mengacu pada suatu pengertian yang serupa. Proses ini berlangsung dengan dukungan *collective action* dan *networking* yang dikembangkan masyarakat. Bartle, (2003) mendefinisikan *community development* sebagai alat untuk menjadikan masyarakat semakin kompleks dan kuat. Ini merupakan suatu perubahan sosial dimana masyarakat menjadi lebih kompleks, institusi lokal tumbuh, *collective power*-nya meningkat serta terjadi perubahan secara kualitatif pada organisasinya.

Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan. Paradigma pembangunan lama yang bersifat *top-down* perlu diorientasikan menuju

pendekatan *bottom-up* yang menempatkan masyarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan atau oleh Chambers dalam Anholt, (2001) sering dikenal dengan semboyan “*put the farmers first*”.

Menurut Nasikun, (2000) paradigma pembangunan harus berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya; termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastrukturnya sehingga distribusi keuntungan dan manfaat akan lebih adil bagi masyarakat. Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, serta memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya), serta dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu pelimpahan atau pemberian kekuatan (*power*) yang akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan, seperti yang dikemukakan Simon, (1990) dalam tulisannya tentang *Rethinking Empowerment*. Simon menjelaskan bahwa pemberdayaan suatu aktivitas refleksi, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subyek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (*self determination*).

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

Pemberdayaan sebagai proses menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pentahapan kegiatan atau upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan menuju keberdayaan. Makna “memperoleh” daya, kekuatan atau kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari akan perlunya memperoleh daya atau kemampuan. Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya, kemampuan atau kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen pembangunan lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian literatur untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena reformasi birokrasi dan inovasi pemberdayaan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mengumpulkan, menggambarkan dan menafsirkan data tentang situasi yang dialami, hubungan kegiatan, sikap yang ditunjukkan dalam proses yang sedang berlangsung, serta kerjasama yang dijalankan.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif meliputi fakta dan informasi tentang reformasi birokrasi dan inovasi pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan pada upaya-upaya pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka memperoleh data yang lengkap dan akurat, maka dilakukan teknik pengumpulan data studi literatur atau kepustakaan, yakni mempelajari dan mendalami berbagai literatur dan artikel ilmiah serta dokumen-dokumen lainnya (seperti laporan) yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, dari awal sampai akhir kegiatan penelitian. Langkah-langkah kegiatan yang ditempuh dalam analisis data tersebut adalah a) reduksi data, b) pengorganisasian dan penggolongan data sesuai dengan tujuan penelitian, c) pemeriksaan terhadap seluruh data secara teliti untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahannya, serta memperoleh gambaran menyeluruh terhadap data, apakah sudah mencukupi atau masih perlu ditambah, e) penafsiran data sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian dan f) verifikasi data dilakukan untuk memeriksa apakah simpulan yang diambil.

PEMBAHASAN

Wewenang dan peranan birokrasi pada negara demokrasi sangat kuat, baik dalam memobilisasi sumber daya pembangunan, perencanaan, maupun pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Di samping itu, kepekaan birokrasi untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan masyarakat baik ekonomi, sosial dan politik sangat sangat dibutuhkan. Faktanya, birokrasi masih belum efisien, hal ini ditandai dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansi dan masih banyak fungsi-fungsi yang sudah seharusnya dapat diserahkan kepada masyarakat masih ditangani pemerintah.

Makin besarnya peran yang dijalankan oleh masyarakat, maka seharusnya peran birokrasi lebih cenderung sebagai agen pembaharuan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan makin besarnya peran yang dijalankan oleh masyarakat, maka seharusnya peran birokrasi lebih cenderung sebagai agen pembaharuan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi demikian menuntut aparatur pemerintah harus dapat memainkan peranan yang penting. Efisiensi dan efektivitas merupakan salah satu prinsip manajemen yang harus selalu dipegang teguh, baik dalam rangka pelaksana kegiatan rutin apalagi dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

Birokrasi harus memiliki kemampuan untuk mendesain strategi usaha yang mendorong ke arah pembaruan dan pembangunan dalam berbagai kebijakan maupun dalam implementasinya. Namun dalam realisasinya seringkali terjadi inefisiensi yang dapat timbul karena faktor kelembagaan, prosedural, kurangnya keahlian dan keterampilan, serta karena perilaku negatif para pelaksana. Faktor kelembagaan dapat menjadi penyebab inefisiensi terutama jika tipe dan struktur organisasi yang digunakan tidak tepat.

Berbagai kajian tentang peran penting birokrasi dalam meningkatkan inovasi daerah dan pemberdayaan masyarakat banyak dilakukan, antara lain penelitian Joseph J. Capuno (2010), mengkaji pentingnya posisi para pemimpin daerah sebagai penggerak utama inovasi pemerintahan di daerahnya masing-masing. Hasil kajiannya dimuat dalam artikel berjudul: *Leadership and Innovation under Decentralization: A Case Study of Selected Local Governments in the Philippines*. Melalui metode observasi dan survey terhadap 209 program inovatif serta FGD terhadap 48 manajer pemerintahan daerah di Filipina dirumuskan beberapa simpulan, antara lain: (a) di era desentralisasi yang sudah berlangsung 20 tahun, pemerintah daerah berhasil melakukan inovasi dalam berbagai sektor; (b) pemimpin daerah

yang masih berkuasa (*incumbent mayors*) menjadi pendorong utama lahirnya ide dan suksesnya pelaksanaan program inovasi di daerahnya; (c) pemimpin yang berhasil mengembangkan inovasi sangat tergantung pada situasi lingkungan (sumber daya alam), pengetahuan, pengalaman, dan insentif yang diterima; (d) jangkauan inovasi daerah yang luas dan bervariasi bermanfaat langsung pada konstituen; (e) faktor kritis lain selain faktor kepemimpinan adalah faktor kelembagaan meliputi kapasitas fiskal daerah, kualitas birokrasi daerah, aparatur yang profesional, dan pelibatan sektor swasta.

Mark Evans (2010), melakukan kajian tentang kapasitas inovasi pemerintahan daerah terhadap delapan studi kasus yang berbeda. Hasil kajian Evans kemudian dirangkum dalam tulisan "*Building the Capacity for Local Government Innovation: Case studies from the Australian, New Zealand, and British contexts*". Kedelapan kasus tersebut menerapkan tipologi inovasi meliputi *strategic innovation*, *product innovation*, *service innovation*, dan *governance innovation* dan derajat inovasi yang dibedakan berdasarkan tujuh perspektif yaitu *place*, *novelty*, *significance*, *utility*, *effectiveness*, *longevity*, dan *transferability*. Melalui metode FGD dengan manajer senior pemerintah daerah terungkap beberapa pelajaran penting bagi pengembangan kapasitas inovasi pemerintah daerah yaitu (a) kapasitas mengetahui adanya kesenjangan metode dan pemberian pelayanan; (b) kapasitas membangun kemitraan dengan stakeholders yang memiliki sumberdaya; (c) kapasitas bertindak dalam kerangka kebijakan legislatif dan memanfaatkan situasi politik secara tepat; (d) munculnya pemimpin yang memiliki agenda reformasi untuk inovasi; (e) dukungan dari pemimpin politik dan manajemen senior; (f) kolaborasi lintas-departemen dan unit pelayanan melalui komunikasi yang efektif; (g) keterlibatan warga lokal; dan (h) tersedianya teknologi baru yang mendukung pelaksanaan program inovasi.

Demikian pula kajian yang dilakukan Lea Hennala, Satu Parjanen dan Tuomo Uotila (2011), meneliti tentang proses inovasi pelayanan publik yang melibatkan multi-aktor. Penelitiannya berjudul: *Challenges of Multi-Actor Involvement in the Public Sector Front-End Innovation Processes Constructing an Open Innovation Model for Developing Well-Being Services*. Menggunakan konsep inovasi, organisasi sektor publik dan *stakeholders* dengan *constructive research approach* dan kombinasi analisis kuantitatif dan kualitatif menghasilkan suatu model inovasi terbuka (*the open innovation model*). Model inovasi terbuka ini mengakui terutama masuknya informasi dari luar dan pengetahuan dari pengguna layanan yang berpotensi menghasilkan wawasan baru dan bernilai tambah terhadap proses pengembangan inovasi.

Berbagai hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam rangka inovasi pemberdayaan masyarakat. Lahirnya reformasi birokrasi juga tidak terpisahkan dari *reinventing government*, yang dimaknai sebagai penciptaan kembali birokrasi dengan mendasarkan pada sistem wirausaha, yakni menciptakan organisasi dan sistem publik yang terbiasa memperbarui secara berkelanjutan, dan memperbaiki kualitasnya tanpa harus memperoleh dorongan dari luar.

Perlunya reformasi birokrasi juga karena berkaitan dengan inovasi sebagaimana dikemukakan Farazmand (2004) melalui konsep *Sound Governance*. Dalam konteks *Sound Governance*, reformasi birokrasi berkaitan dengan inovasi dalam kebijakan dan administrasi publik. Hal ini sebagaimana dikemukakan Farazmand (2004:19) bahwa:

Innovation is key to sound governance, and innovation in policy and administration is central to sound governance as well. Without policy and administrative innovations, governance falls into decay and ineffectiveness, loses capacity to govern, and becomes a target of criticism and failure. Sound governance, therefore, demands continuous innovations in policy and administration

processes, structures, and value systems. Innovations in technology, resource development, communication systems, organization and management, training and development, research, and a host of other areas are essential to the soundness of governance and administration.

Pandangan di atas menjelaskan bahwa inovasi adalah hal sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap pemerintahan. Pemerintahan tidak lagi berhadapan dengan masalah dan realitas rutin saja. Peran pemerintah dalam inovasi pemberdayaan masyarakat setidaknya-tidaknya dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

Pertama, peran pemberdayaan. Birokrasi dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan, tidak harus berupaya melakukan sendiri, tetapi mengarahkan “*steering rather than rowing*”, atau memilih kombinasi yang optimal antara *steering* dan *rowing* apabila langkah tersebut merupakan cara terbaik untuk mencapai kesejahteraan sosial yang maksimal. Sesuatu yang sudah bisa dilakukan oleh masyarakat, tidak perlu dilakukan lagi oleh pemerintah. Apabila masyarakat atau sebagian dari mereka belum mampu atau tidak berdaya, maka harus dimampukan atau diberdayakan (*empowered*). Pemberdayaan berarti pula memberi peran kepada masyarakat lapisan bawah di dalam keikutsertaannya dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Steering rather than rowing dalam konteks pemberdayaan artinya lebih baik daripada melayani. Maksudnya adalah dalam hal ini, peran pemerintah adalah memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai kebutuhan publik, sehingga tercipta rasa memiliki bagi mereka sendiri, sedangkan pemerintah bukan lagi sebagai pelayan melainkan hanya sekedar memberi petunjuk.

Beberapa hal yang mencakup bidang *empowering* adalah pergeseran berbagai hak kepemilikan produk pelayanan publik dari tangan pemerintah kepada masyarakat umum di mana peran pemerintah hanya sebagai pengarah saja, kemudian pendirian perumahan umum yang lebih tertib, aman, bersih, harga terjangkau serta pendataan yang lebih terorganisir. Selain itu berbagai hal yang dianggap penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah memperbaiki peran *profesional service* menjadi *community service*, sehingga pelayanan bukan ditujukan hanya untuk klien saja tetapi untuk semua, serta pemberdayaan segenap lapisan masyarakat melalui demokrasi yang partisipatif.

Berkaitan implementasi reformasi birokrasi dalam inovasi pemberdayaan masyarakat, maka peran pemerintah dapat di-*reinventing* antara lain melalui:

1. Mengurangi hambatan dan kendala-kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat,
2. Memperluas akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan
3. Mengembangkan program untuk lebih meningkatkan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia sehingga memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

Melalui prinsip *reinventing government*, pemerintah harus memenuhi kebutuhan *consumer* (masyarakat) bukan kebutuhan birokrasi. Gejala yang selama ini ada para administrator bekerja untuk mendapatkan prestasi yang akan dinilai baik oleh atasannya. Para bawahan akan berusaha membuat atasan senang agar dia mendapatkan pangkat yang lebih tinggi. Sedangkan masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang baik dari para administrator menjadi faktor sampingan, faktor yang utama adalah seorang administrator harus melayani kebutuhan para pejabat.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat para administrator harus merubah orientasi pelayanan dari melayani kebutuhan para birokrat menjadi melayani kebutuhan masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan merasa terayomi oleh pemerintah, merasa dekat secara emosional dengan pemerintah. Hal ini akan terjadi jika telah terwujud *civil society* dalam masyarakat. Dengan *civil society* masyarakat akan mempunyai akses dalam mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan. Jika terjadi pelanggaran, misalnya para birokrat tidak melayani masyarakat dengan baik tetapi melayani birokrat atasannya, maka masyarakat akan meniupkan peluit sebagai tanda peringatan kepada administrator. Dengan demikian penyimpangan akan semakin dikurangi.

Kedua, peran pelayanan. Upaya pemberdayaan memerlukan semangat untuk melayani masyarakat “*a spirit of public services*”, dan menjadi mitra masyarakat “*partner of society*”; atau melakukan kerja sama dengan masyarakat “*coproductio atau partnership*”. Hal tersebut memerlukan perubahan perilaku yang antara lain dapat dilakukan melalui pembudayaan kode etik “*code of ethical conducts*” yang didasarkan pada dukungan lingkungan “*enabling strategy*” yang diterjemahkan ke dalam standar tingkah laku yang dapat diterima umum, dan dijadikan acuan perilaku aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah-daerah.

Pemerintahan yang kompetitif adalah pemerintah yang menyuntikkan kompetisi ke dalam pemberian pelayanan. Kompetisi yang dimaksud di sini adalah kompetisi di mana sektor publik vs sektor publik, sektor privat vs sektor publik, dan sektor privat vs sektor privat. Kondisi ini dipercaya akan menciptakan suatu iklim persaingan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan berpengaruh pada harga pelayanan publik. Berbagai keuntungan yang diperoleh dari kompetisi ini adalah tingkat efisiensi yang lebih besar, pelayanan yang lebih mengarah pada kebutuhan masyarakat, menciptakan sekaligus menghargai suatu inovasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kebanggaan dan moralitas pegawai pemerintah.

Pelayanan berarti pula semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun, yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku “melayani, bukan dilayani”, “mendorong, bukan menghambat”, “mempermudah, bukan mempersulit”, “sederhana, bukan berbelit-belit”, “terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang”. Makna administrasi publik sebagai wahana penyelenggaraan pemerintahan negara, yang esensinya “melayani publik”, harus benar-benar dihayati para penyelenggara pemerintahan negara.

Paradigma tradisional tentang birokrasi pemerintahan menyatakan bahwa birokrasi pemerintahan ibarat sebuah perahu besar yang dapat menyelamatkan seluruh warga negara dan masyarakat dari bencana banjir ekonomi maupun politik. Hal ini menyebabkan pemerintah merupakan aktor tunggal untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dan masyarakat akan semakin tergantung kepada pemerintahnya. Paradigma tradisional ini menyebabkan pemerintah tidak bisa lagi berpikir jernih untuk meningkatkan mutu kerjanya, karena sudah dililit oleh aktivitas-aktivitas rutin untuk melayani kebutuhan masyarakat. Mutu pelayanan kepada masyarakat tidak bisa ditingkatkan lagi. Untuk itu perlu perubahan paradigma, agar pemerintah tidak lagi sebagai pelaksana tunggal pelayanan kepada masyarakat tetapi bermitra dengan pihak swasta. Agar pemerintah tidak lagi terjerat dengan kegiatan rutin sebagai pelayan masyarakat, maka pemerintah perlu memikirkan untuk menyerahkan tugas-tugas pelayanan tersebut kepada masyarakat (NGO -*non government organization*- atau pihak swasta) atau melaksanakan pelayanan tersebut dengan bermitra dengan masyarakat (sistem koproduksi).

Pemerintah yang banyak melaksanakan tugas pelayanan akan semakin memberikan peluang kepada gagalnya atau lemahnya mutu pekerjaan, maka dalam kondisi ini akan lebih baik jika pemerintah menyerahkan urusan tersebut kepada swasta dan pemerintah hanya menetapkan peraturan-peraturan yang akan dilaksanakan oleh pihak swasta. Dengan memfokuskan diri kepada pengarahan, maka daya pikir para pembuat kebijakan publik akan meningkat dan cermat, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil akan lebih produktif dan lebih cermat.

Ketiga, transparansi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping mematuhi kode etik, aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas, bersikap terbuka dan bertanggung jawab untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia di dalamnya berperan dalam mengamalkan dan melembagakan kode etik dimaksud, sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat; dan itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara.

Berdasarkan prinsip transparansi, upaya pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, peningkatan partisipasi dan kemitraan, selain (1) memerlukan keterbukaan birokrasi pemerintah, juga (2) memerlukan langkah-langkah yang tegas dalam mengurangi peraturan dan prosedur yang menghambat kreativitas dan otoaktivitas mereka. serta (3) memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam proses penyusunan peraturan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Pemberdayaan dan keterbukaan akan lebih mendorong akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya, dan adanya keputusan-keputusan pembangunan yang benar-benar diarahkan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta dilakukan secara riil dan adil sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Paparan di atas menegaskan bahwa pemerintah semestinya digerakkan oleh misi. Maksudnya adalah pemerintahan akan berjalan lebih efisien apabila digerakkan bukan atas dasar aturan saja, tetapi lebih kepada ‘misi’, sehingga penganggaran yang dibutuhkan juga diarahkan pada pencapaian misi sehingga lebih terkontrol. Berbagai keuntungan yang diperoleh dari *mission-driven government* ini adalah lebih efisien, lebih efektif, lebih inovatif, dan lebih fleksibel jika dibandingkan dengan *ruled-driven organizations*. Dengan keadaan ini, maka diyakini bahwa moralitas sektor publik juga serta-merta akan meningkat.

Kekuatan dari *mission-driven government* ini adalah peningkatan insentif terhadap tabungan, menciptakan kebebasan sumber daya dalam menguji ide-ide baru, mengacu pada *autonomy managerial*, menciptakan lingkungan yang terprediksi, kemudian menyederhanakan proses *budgeting*, serta mengurangi pengeluaran auditor dan kantor pajak, yang pada akhirnya fokus pemerintah lebih leluasa terhadap isu-isu penting lainnya.

Selain ketiga peran di atas, konsep pemberdayaan juga selalu dikaitkan dengan pendekatan partisipasi dalam manajemen pembangunan, dan memberikan penekanan pada desentralisasi dalam proses pengambilan keputusan agar diperoleh hasil yang diharapkan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hubungan itu perlu dicatat pentingnya peranan keswadayaan masyarakat, dan menekankan bahwa fokus pembangunan yang hakiki adalah peningkatan kapasitas perorangan dan kelembagaan (“capacity building”). Jangan diabaikan pula penyebaran informasi mengenai berbagai potensi dan peluang pembangunan nasional, regional, dan global yang terbuka bagi daerah; serta privatisasi dalam pengelolaan usaha-usaha negara.

Pemberdayaan juga berkaitan dengan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam membangun masyarakat yang modern di mana dunia usaha menjadi ujung tombaknya, terwujudnya

kemitraan, dan modernisasi dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah yang terarah pada peningkatan mutu dan efisiensi serta produktivitas usaha amat penting, khususnya dalam pengembangan dan penguasaan teknologi dan manajemen produksi, pemasaran, dan informasi. Dalam upaya mengembangkan kemitraan dunia usaha yang saling menguntungkan antara usaha besar, menengah, dan kecil, peranan pemerintah ditujukan kearah pertumbuhan yang serasi.

Pemerintah berperan dalam menciptakan iklim usaha dan kondisi lingkungan bisnis, melalui berbagai kebijaksanaan dan perangkat perundang-undangan yang mendorong terjadinya kemitraan antarskala usaha besar, menengah, dan kecil dalam produksi dan pemasaran barang dan jasa, dan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan lainnya, serta pengintegrasian usaha kecil ke dalam sektor modern dalam ekonomi nasional, serta mendorong proses pertumbuhannya.

SIMPULAN

Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk meluruskan kembali birokrasi pada posisi dan misi atau perannya yang sebenarnya selaku pelayan dan pemberdaya masyarakat. Lahirnya reformasi birokrasi adalah karena tuntutan terhadap birokrasi yang semakin tinggi. Birokrasi diharapkan mampu menjadi motivator sekaligus katalisator dari bergulirnya pemberdayaan masyarakat. Birokrasi tidak hanya dituntut mengedepankan kemampuan menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi saja tetapi juga merespons aspirasi publik ke dalam kegiatan organisasi dan mampu melahirkan inovasi baru yang bertujuan untuk mempermudah kinerja organisasi sekaligus sebagai bagian dari wujud aparat yang profesional.

Di era reformasi birokrasi, hal yang mencakup bidang pemberdayaan adalah pergeseran berbagai hak kepemilikan produk pelayanan publik dari tangan pemerintah kepada masyarakat umum di mana peran pemerintah hanya sebagai pengarah saja, memperbaiki peran *profesional service* menjadi *community service*, sehingga pelayanan bukan ditujukan hanya untuk klien saja tetapi untuk semua.

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi publik dan pelayanan pemerintah yang lebih baik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka pemberdayaan birokrasi ke arah penciptaan profesionalisme pegawai menjadi sangat menentukan. Terbaikannya unsur profesionalisme akan berdampak kepada menurunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Berkaitan implementasi reformasi birokrasi dalam inovasi pemberdayaan masyarakat, maka peran pemerintah dapat di-*reinventing* antara lain melalui pengurangan hambatan dan kendala-kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat, memperluas akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan mengembangkan program untuk lebih meningkatkan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia sehingga memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Pervaiz K dan Rafiq, Mohammed. 2002. *Internal Marketing*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Bartle, P. 2003. *Key Words C of Community Development, Empowerment, Participation*. Balai Pustaka: Jakarta.
<http://www.scn.org/ip/cds/cmp/key-c.htm>).

- Bryant dan White, 1987. Posted on 08 oct, 2009 by Admin in Kemiskinan, Pemberdayaan, Social Capital.
- Caiden, Gerald E. 1969. *Administrative Reform*. Chicago, Illinois: Aldine Publishing Company.
- Capuno, Joseph J. 2010. *Leadership and Innovation Under Decentralization: A Case Study of Selected Local Governments in the Philippines*. Discussion Paper No. 2010–10. University of the Philippines School of Economics.
- Chambers, R., 1985. *Rural Development: Putting the Last First*. London; New York: Longman.
- <https://duniapemerintahan.wordpress.com/2014/12/03/fungsi-birokrasi-sebagai-pelayanan-mitra-dan-pemberdayaan-masyarakat/>
- Farazmand, Ali (ed). 2004, *Sound Government; Policy and Administrative Inovations*, Westport, London: Preager
- Hennala, Lea., Satu Parjanen & Tuomo Uotila. 2011. “Challenges of Multi-Actor Involvement in the Public Sector Front-End Innovation Processes Constructing an Open Innovation Model for Developing Well-Being Services”: *European Journal of Innovation Management*: Vol. 14 No. 3, pp. 364-387.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2010a. *Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025*. Jakarta: Kementerian PAN-RB.
- Lam, Alice. 2004. *Organizational Innovation*. Working Paper No. 1: Brunel University Brunel Research in Enterprise, Innovation, Sustainability, and Ethics Uxbridge, West London.
- Nasikun, 2003, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 1998. *Nasionalisme dan Demokrasi di Indonesia Menghadapi Tantangan Globalisasi*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Rogers, Everett M., 1983, *Diffusion of Innovations*, Free Press, London
- _____, 2003, *Diffusions of Innovations Forth Edition*, Tree Press, New York.
- Sherwood, Dennis, 2002. *Smart Things to Know about Innovation & Creativity*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Simon, B.L. 1990. *Rethinking Empowerment*. Journal of Progressive Human Services, 1. 27-39.
- Slappendel, Carol. 1996. “*Perspectives on Innovation in Organizations*”. In Organization Studies, 17(1): 107–129.
- Thoha, Miftah. 2009. *Reformasi Sistem dan Perilaku Birokrasi Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 30 Tahun 2009. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).

PERILAKU PEMILIH PEMULA DALAM PILKADA SERENTAK DI Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang TAHUN 2015

Oleh: **H. Basuki Rachmat dan Esther**
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstract

Act No. 10 of 2008 on general elections to mention that voters are those who are first time to vote and aged 17 years or older or are/have been married have the right to vote in elections (and election). Voters beginners who are just entering the age of suffrage also do not yet have broad political range, to determine where they should vote. So, sometimes what they choose is not as expected.

The reason this is causing voters are very prone to be influenced and approached the material approach to the political interests of parties politik. Ketidaktahuan in terms of practical politics, especially with the choices in elections or local elections, voters often do not make rational thought and more thought-term interests short.

New voters are often only used by political parties and politicians to serve political interests, for example be used for fundraising period and the formation of the party underbow organization.

Keywords: unmannerly voters novice

Abstrak

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum (dan Pemilu). Pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih juga belum memiliki jangkauan politik yang luas, untuk menentukan kemana mereka harus memilih. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Alasan ini yang menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk dipengaruhi dan didekati dengan pendekatan materi politik kepentingan partai-partai politik. Ketidaktahuan dalam soal politik praktis, terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pemilu atau pilkada, membuat pemilih pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek.

Pemilih pemula sering hanya dimanfaatkan oleh partai politik dan politisi untuk kepentingan politiknya, misalkan digunakan untuk penggalangan masa dan pembentukan organisasi *underbow* partai.

Kata kunci: perilaku, pemilih pemula

PENDAHULUAN

Amanat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung. Implementasi demokrasi langsung itu juga terwujud dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Kabupaten Serang Provinsi Banten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2015.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum (dan Pemilu). Layaknya

sebagai pemilih pemula, mereka selalu dianggap tidak memiliki pengalaman memilih (*voting*) pada pemilu sebelumnya. Namun, ketiadaan pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan untuk menyalurkan aspirasi politiknya, namun mereka tetap melaksanakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara.

Pemilih pemula adalah pemilih yang ikut andil menentukan pemimpin di daerah tertentu. Perilaku pemilih pemula menjadi indikator kualitas demokrasi secara substansial pada saat ini dan masa akan datang. Karena kondisinya masih labil dan mudah dipengaruhi oleh kalangan-kalangan partai politik. Untuk melihat perilaku pemilih pemula ada beberapa pendekatan yang dilihat menurut **Dennis Kavanagh** melalui buku-nya yang berjudul ***Political Science and Political Behavior***, menyatakan terdapat tiga model untuk menganalisis perilaku pemilih. Yakni pendekatan sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional. Ketiga pendekatan tersebut merupakan suatu hal yang fenomenal dan menjadi perilaku memilih masyarakat dalam pemilukada, khususnya dikalangan pemilih pemula yang menjadi dasar dalam menentukan tindakan politiknya. Sehingga pendekatan ini dapat menjelaskan sebab dan arah perilaku pemilih pemula yang akan dibuktikan melalui penelitian ini.

Fakta-fakta empirik tersebut yang juga didukung oleh aspek teoritik maka sangat menarik untuk mencermati kecenderungan perilaku politik pemilih pemula dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang calon atau kandidat tertentu di Kabupaten Serang pada Tahun 2015. Berdasarkan realitas di atas maka penulis merasa tertarik untuk menganalisis fenomena politik Kabupaten Serang melalui penelitian yang berjudul: ***“Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Ciomas pada Pemilukada Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2015”***.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar dampak Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Ciomas Pada Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2015 ?
2. Seberapa besar kecenderungan perilaku pemilih pemula di Kecamatan Ciomas dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang calon atau kandidat tertentu pada pemilukada Kabupaten Serang tahun 2015 ?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mencari data dukung tentang bagaimana perilaku pemilih pemula di Kecamatan Ciomas pada Pemilukada di Kabupaten Serang Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan serta melakukan analisis kecenderungan perilaku pemilih pemula di Kecamatan Ciomas dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang calon atau kandidat tertentu pada pemilukada Kabupaten Serang tahun 2015.

TINJAUAN KONSEPTUAL

Jumlah penduduk sebanyak 38.369 jiwa, penduduk yang kategori pemilih pemula adalah sebanyak 3.724 jiwa yaitu antara usia 15 –19 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, pada

Pasal 1 ayat (22), pemilih pemula adalah penduduk yang sudah berusia 17 tahun keatas. Pemilih yang susah menikah. Berarti usia 15 dan 16 tahun dapat diwajibkan untuk memilih asalkan sudah menikah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kecamatan Ciomas. Bahwa penduduk yang berusia 15 sampai 17 tahun serjumlah sebanyak 373 jiwa, yaitu sebesar 10 % dari total jumlah penduduk Kecamatan Ciomas. Dari 373 jiwa yang berhak memilih usia 15–16 tahun yang sudah menikah sebanyak 60 jiwa, sedangkan sisanya sebanyak 313 jiwa yang berusia 17 tahun.

Dalam hal ini peneliti melakukan sampel dengan menyebar kuisisioner dengan melakukan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, dan pendekatan historis, serta pendekatan rasional. Dimana untuk pendekatan sosiologis dan historis peneliti gabungkan jumlah responden, dimana pendekatan sosiologis sebanyak 39 responden, sedangkan pendekatan historis sebanyak 21 responden. Pada hakekatnya kedua pendekatan ini hampir sama, berdasarkan teori yang peneliti gunakan. Yaitu pendekatan yang diakibatkan, factor kedekatan, ikut-ikutan karena orang tua atau suami dari pemilih. Sedangkan pendekatan Rasional kuisisioner yang peneliti sebar dan diambil sampelnya sebanyak 68 jiwa dari jumlah pemilih rasional sebanyak 253 jiwa. Dalam penelitian ini menggunakan analisis cluster dari ketiga pendekatan tersebut dan usia pemilih pada saat dilakukannya PILKDA serentak di Kabupaten Serang Khususnya di Kecamatan Ciomas Tahun 2015.

Perilaku Politik

Menurut Jack C. Plano Perilaku dapat dipahami sebagai pikiran atau tindakan manusia yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Dalam hal ini yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan-tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap, dan keyakinan) dan juga tindakan-tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerak protes, lobi, kaukus dan kampanye). Jadi perilaku tidak hanya diartikan sebagai pemikiran ataupun tanggapan yang bersifat abstrak, tapi juga sebagai tindakan-tindakan dari pelaku politik tertentu.

Teori yang menggunakan pendekatan sosiologis ini, menurut Martin Harrop dan William Miller, adalah *contagion theory* atau teori penularan. Menurut teori ini, pilihan politik seseorang dan *partisipanship* (semangat berpartisipasi seseorang dalam kehidupan politik) dapat menular kepada orang lain melalui kontak sosial seperti penyakit infeksi. Dengan kata lain, perilaku politik seseorang disebabkan apa yang dibicarakan bersama yang akhirnya menjadi pilihan bersama.

Pemilih Pemula

Pemilih pemula di Indonesia di bagi atas tiga kategori. Pertama, pemilih yang rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih. Menurut pasal 1 ayat (22) UU No. 10 Tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/belum kawin. Kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 Tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar oleh penyelenggara pilkada dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin.

Pengertian tersebut dapat di tarik simpulan bahwa pemilih pemula adalah warga negara yang di daftar oleh penyelenggara pilkada dalam daftar pilkada. Dan baru mengikuti pilkada (memberikan suara) pertama kali sejak pilkada yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17–21 tahun. Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang berstatus mahasiswa serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam ritual demokrasi (pilkada) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke tingkat yang lebih optimal agar dapat berperan dalam bidang politik. Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang berstatus mahasiswa serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam ritual demokrasi (pilkada) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke tingkat yang lebih optimal agar dapat berperan dalam bidang politik.

Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa ciri-ciri pemilih pemula yaitu:

1. Warga negara Indonesia dan pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin.
2. Baru mengikuti pilkada (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17–21 tahun.
3. Mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pilkada 2015.

Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok.

Terdapat beberapa daerah/wilayah yang merupakan kumpulan komunitas masyarakat yang terbentuk atas dasar sistim kekerabatan dan paguyuban berdasarkan keturunan yang menjadi pemuka masyarakat tersebut berasal dari keluarga atau kerabat asli keturunan dari orang yang dipandang terkemuka dari segi sosial ekonomi atau terkemuka karena ketokohnya, Sehingga warga masyarakat seringkali menyandarkan diri dan sikapnya terhadap pemuka/tokoh masyarakat tersebut. Sikap ini mencerminkan adanya dominasi ketokohan yang berperan untuk menentukan sikap dan perilaku serta orientasi warga bergantung pada pemuka tersebut.

Kecenderungan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam berbagai kehidupan sosial ekonomi, sosial politik maupun sosial budaya, terbatas pada adanya sistem ide atau gagasan dari pemuka masyarakat untuk memodifikasi sistem sosial dan sistem budaya yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat disesuaikan dengan kondisi dan dinamika masyarakat. Faktor ini menjadi kendala bagi kandidat atau calon legislatif untuk menerobos masuk ke dalam komunitas masyarakat tersebut dalam rangka sosialisasi atau sekedar silaturahmi. Jika calon legislatif berhasil masuk ke dalam komunitas masyarakat tersebut, hanya sebatas etika pergaulan masyarakat yaitu menerima setiap tamu yang bersilaturahmi, tetapi tidak akan mengikuti apa yang diinginkan oleh kandidat/calon legislatif yang bersangkutan.

Komunitas masyarakat yang heterogen cenderung lebih bersifat rasional, pragmatis, tidak mudah untuk dipengaruhi, terkadang memiliki sikap *ambivalen*, berorientasi ke materi. Sikap dan pandangan untuk memilih atau tidak memilih dalam proses politik lebih besar, sehingga tingkat kesadaran dan

partisipasi politiknya ditentukan oleh sikap dan pandangan individu yang bersangkutan, tidak mudah untuk dipengaruhi oleh tokoh atau ikatan primordialisme tertentu.

Pemilukada Langsung

Ketika UU No. 22 Tahun 1999 dilakukan, upaya untuk menggeser sejarah sentralisasi ke desentralisasi pun belum sepenuhnya terwujud. Nuansa pengaturan relasi pemerintahan pusat dengan daerah pun mencuatkan resentralisasi ketika UU no. 32 Tahun 2004 dibahas dan kemudian disahkan. UU no.32 Tahun 2004 pasal 56 ayat 1 berbunyi:

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilukada langsung adalah momentum paling strategis untuk memilih Kepala Daerah yang berkualitas. Keberhasilan pilkada langsung tidak diukur oleh proses penyelenggaraannya yang lancar dan damai tetapi juga manfaat atau hasil yang diperoleh. Apakah telah menghasilkan pemimpin yang berkualitas terutama dari sisi manajerial dan kompetensi. Bila Pilkada langsung hanya digunakan sebagai perebutan kekuasaan melalui mekanisme voting yang hanya populer dan diterima secara luas. Namun tidak mempunyai kecakapan dan kemampuan dalam mengelola Daerah. Sekaligus Kepala Daerah adalah jabatan politis dan tidak mempunyai keahlian khusus, namun kemampuan manajerial dan kompetensi secara penting.

Pertisipasi politik

Partisipasi politik itu merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses demokrasi secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negaranya meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah.

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah (Sastroatmojo. 1995:67)

Tinjauan Normatif

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah Pasal 11 ayat 5 diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Selanjutnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin.

Bertolak dari norma hukum ini, pemilih pemula dapat didefinisikan sebagai para pemilih yang baru pertama kali terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat pemilu legislatif atau pileg). Mereka terdaftar tetapi belum tentu datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Atau, mereka datang ke tempat pemungutan suara (TPS) hanya sebagai penonton atau mencoblos dengan benar dan rasional atau mencoblos dengan benar tetapi emosional atau salah mencoblos surat suara sehingga suaranya menjadi tidak sah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan pola 2 (dua) tahap, sejalan dengan metoda yang digunakan, yakni metoda studi kasus. Alasan pemilihan studi kasus adalah sebagaimana dijelaskan oleh Merriam, Yin dalam Cresswell (1994:12), bahwa:

Case studies, in which the researcher explores a single entity or phenomenon ("the case") bounded by time and activity (a program, event, process, institution, or social group) and collects detailed information by using a variety of data collection procedure during a sustained period of time.

Melalui studi kasus diharapkan model yang dihasilkan pada Kabupaten/Kota lokasi penelitian akan dapat direpresentasikan atau digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan kasus-kasus serupa di Kabupaten/Kota lain.

HASIL DAN ANALISIS

Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Ciomas pada Pemilu 2015

Untuk melihat perilaku pemilih pemula ada beberapa pendekatan yang dilihat menurut Dennis Kavanagh melalui buku-nya yang berjudul *Political Science and Political Behavior*, menyatakan terdapat tiga model untuk menganalisis perilaku pemilih, yakni pendekatan sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional. Merujuk pada hasil studi serta pendekatan-pendekatan di atas, penelitian ini mencoba menggambarkan dan menganalisis tentang kecenderungan perilaku pemilih pemula. Ketiga pendekatan ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pendekatan Sosiologis

Setelah dilakukan hitungan secara matematis dengan analisis cluster yang peneliti lakukan, bahwa pemilih pemula dalam melakukan pilihannya, dengan pendekatan sosiologis, yang setuju dengan jawaban pertama, hanya sebanyak 9 orang, dan yang setuju dengan jawaban kedua sebanyak 17 orang, sedangkan sisanya tidak setuju dan abstain. hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan faktor kedekatan, karena

mengikuti apa yang dipilih oleh orang tuanya, atau suaminya. Jadi pilhan yang dijatuhkan sama dengan pilihan dari orang tuanya atau suaminya.

Dimana peneliti mensimpulkan bahwa pilihan pemilih pemula tersebut dipengaruhi latar belakang lingkungan tempat tinggal, yakni lingkungan keluarganya. Perilaku ikut-ikutan demikian disebabkan karena mereka tidak mampu dan melihat bagaimana karakteristik pemimpin yang tepat menurut mereka. Selain itu, keputusan politik mereka masih belum bulat menyebabkan pilihan politik mereka mudah mendapat pengaruh dari lingkungan dan pengelompokan sosial yang terbentuk di tempat tinggal mereka, khusus di dalam keluarga dan orangtua.

Pernyataan di atas jelas bahwa pemilih pemula tidak tersentuh atau mendapatkan pendidikan politik bagaimana memilih pemimpin yang cocok dengan mereka. Selain itu perilaku ikut-ikutan demikian juga diakibatkan karena kurangnya mental pemilih pemula untuk menentukan pilihan mereka juga belum tahu bagaimana memilih pemimpin yang tepat. Meskipun demikian, perilaku tersebut menunjukkan Adanya preferensi pilihan yang sama dengan preferensi pilihan orangtuanya.

Hal ini sejalan dalam pendekatan sosiologis yang melihat hubungan antara predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. Predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang berkaitan dengan perilaku memilih seseorang. Misalnya, preferensi-preferensi politik keluarga, apakah preferensi politik ayah, atau preferensi politik ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak. Predisposisi sosial ekonomi bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis dan lain-lain.

Namun, perilaku demikian tidak lepas dari isu yang didapatkan oleh seorang anak lebih banyak berasal di dalam keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan seorang anak. Waktu yang mereka gunakan di lingkungan keluarga juga lebih banyak dibandingkan di lingkungan sekolah dan teman sebaya. Hal demikian menyebabkan akses komunikasi yg diterima di lingkungan keluarga lebih mudah.

Seperti yang diutarakan oleh Udin, salah seorang warga menyatakan bahwa:

“Sebenarnya saya tidak tahu menahu dan tidak ingin terlibat atau berpartisipasi dalam pemilu karena namun karena orang tua mengajak untuk memilih kandidat yang mereka pilih maka saya ikut saja.”

Tidak berbeda dengan yang diutarakan Nirwana, salah seorang warga menyatakan bahwa:

“Saya sudah memperoleh kartu pemilih, jadi sebuah kewajiban bagi saya untuk memilih. Meskipun saya tidak faham apa itu pemilu. Tapi orangtua saya menyuruh untuk memilih seorang kandidat.”

Dari petikan pernyataan di atas yang diutarakan Udin bahwa mereka diarahkan oleh orang tuanya karena tidak tahu-menahu menunjukkan karena mereka kurang paham atau mengetahui isu politik. Model perilaku ini tidak banyak yang dialami oleh seorang anak terhadap orang tuanya karena dengan sendirinya mereka akan senang-tiasa dan membenarkan apa yang menjadi kehendak orang tuanya. Dalam hal ini perilaku pemilih pemula ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu.

Menurut penulis, perilaku pemilih pemula di Kecamatan Ciomas ini mudah diintimidasi, khususnya dalam menetapkan pilihannya pada pemilih sebagaimana sifat mereka yang sangat rentang dan masih labil. Dalam penelitian ini, orangtua sebagai lingkungan sosial terdekat sangat mempengaruhi pilihan

seorang anak. Dimana dalam lingkungan keluarga terjadi proses sosialisasi. Dari proses sosialisasi kemudian Pemilih pemula menyerap informasi berupa isu-isu dan tema dan kandidat lebih dominan daripada lingkungan sekolah, teman sebaya, dan lainnya.

Lebih lanjut menurut penulis, bahwa adanya pemilih pemula yang yang tidak banyak tahu keikutsertaan dan dalam menjatuhkan pilihan terhadap seorang kandidat menunjukkan tipe apatis mereka. Tipe ini menunjukkan perilaku acuh tidak acuh di kalangan pemilih, khususnya pemilih pemula yang dilatarbelakangi karena persepsi tidak pentingnya mereka ikut berpartisipasi dalam pemilu.

Akibatnya mereka kurang terlibat dalam pemilihan seperti menjadi tim sukses atau menjadi anggota partai politik. Selain itu pula tidak mengikuti perkembangan informasi dan isu-isu politik yang terjadi.

Sedangkan analisis dengan metode kuantitatif terdapat 26 responden atau sebesar 66,66 % yang sangat setuju dan setuju sedangkan sebanyak 4 responden atau 10,26% yang bingung/asal mencoblos serta sisanya yaitu sebanyak 9 orang atau sebesar 20,08% menjawab tidak memilih dan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa analisis secara kuantitatif memberi penguatan terhadap analisis kualitatif sehingga penggunaan metode campuran untuk lebih mendapatkan analisis yang sesuai sangat baik.

b. Pendekatan Psikologis

Berdasarkan hasil kuisioner yang peneliti lakukan, dan peneliti mendapatkan jawaban berdasarkan hitungan analisis cluster, dimana kecenderungan pemilih pemula dalam menjatuhkan pilihannya pada jawaban pertama sebanyak, 9 orang dan jawaban kedua sebanyak 9 orang, sedangkan 3 orang untuk jawaban ke tiga, sisanya abstain dan tidak memilih.

Menurut pendekatan psikologis ada beberapa faktor yang mendorong pemilih menentukan pilihannya, yaitu: identifikasi partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema. Pertama, identifikasi partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik sering diwariskan oleh orang tua, serta dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan perkawinan, dan situasi krisis.

Namun, figur kandidat yang dianggap memiliki kharismatik dan sosok idaman bagi masyarakat dalam penelitian ini lebih mempengaruhi psikologis pemilih pemula, Mengingat kecenderungan pemilih pemula menjatuhkannya pilihannya karena adanya konteks ketokohan yang berperan dominan.

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan adanya perilaku yang psikologis pada pemilih pemula. Dimana pemilih pemula menjatuhkannya pilihan pada figur kandidat yang mereka idolakan. Meskipun tidak banyak diantara menunjukkan perilaku model ini. Menurut penulis, adanya perilaku psikologis ini adanya kedekatan pemilih pemula terhadap figur kandidat yang mereka anggap mampu memimpin daerahnya.

Dalam pendekatan psikologis, Adanya pemilih yang mengidolakan seorang kandidat adalah hasil evaluasi terhadap kandidat. Evaluasi terhadap kandidat sangat dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa lalu kandidat baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Beberapa indikator yang biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seseorang kandidat, khususnya bagi para pejabat yang hendak mencalonkan kembali, di antaranya kualitas, kompetensi dan integritas kandidat.

Menurut penulis, Dalam prakteknya, pendekatan sosiologis saling berkaitan dengan pendekatan psikologis. Seseorang yang memilih seorang kandidat bisa jadi atas pertimbangan kesamaan suku dan agama. Namun hal itu diperantarai oleh persepsi dan sikap, baik terhadap faktor sosiologis tersebut maupun terhadap partai politik atau kandidat. Yang muncul kemudian bukan faktor sosiologis secara objektif, melainkan faktor sosiologis sebagaimana dipersepsikan. Dalam prosesnya, pentingnya faktor sosiologis akan terkait dengan faktor psikologis.

Sedangkan analisis dengan metode kuantitatif terdapat 18 responden atau sebesar 85,72 % yang sangat setuju dan setuju sedangkan sisa sebanyak 3 responden atau sebesar 14,28 yang bingung/ asal mencoblos serta tidak ada responden yang menjawab yang lain. Dalam pendekatan ini keraguan responden terhadap apa yang akan dipilihnya tidak terlihat sehingga analisis dalam metode campuran jelas terlihat kesamaan simpulannya.

c. Pendekatan Pilihan Rasional

Hasil pendekatan rasional yang didapat pada jawaban pertama sebanyak 20 orang dan jawaban kedua sebanyak 32 orang, dan sisanya tidak memilih dan abstain, dari jumlah kuisioner yang disebar sebanyak 68 kuisioner adapun jumlah pemilih pemula yang berusia 17 tahun keatas adalah berjumlah 253 orang pemilih.

Pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) atau lazim disebut sebagai pendekatan ekonomik berkembang pada tahun 1960-an dan berkembang setelah memperoleh konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan.

Secara independen ada dua informan yang memilih karena alasan rasional mengapa kandidat tersebut harus dipilih dan kemudian membandingkan hal tersebut dengan kandidat lainnya. Hingga kemudian mereka mengumpulkan informasi-informasi yang dapat mereka terima terkait kandidat tersebut. Berikut petikan hasil wawancara dengan salah seorang warga Kecamatan Ciomas Muh. Nur Syam, ketika diwawancarai menyatakan:

“Saya memilih karena ada beberapa hal, yaitu karena kandidat tersebut memiliki banyak penghargaan, sudah terbukti memiliki kepemimpinan yang baik, ini dapat dilihat dari keberhasilannya membangun daerah.”

Pernyataan di atas tidak berbeda dengan yang diutarakan oleh salah seorang warga Ciomas Irwan, ketika diwawancarai menyatakan: “katanya visi-misi yang ditawarkan sangat bagus dan masuk akal. Khususnya dalam pertanian, dan daerah kita adalah daerah pertanian, saya sangat suka dengan programnya.”

Pemilih pemula dalam memilih tidak tidak memperoleh keuntungan apapun dalam memberikan kemenangan pada calon telah terpilih. Meskipun tidak banyak/beberapa diantara mereka mencoba memberikan alasan yang yang rasional dengan mengungkapkan keberhasilan dan visi-misi yang ditawarkan oleh kandidat tertentu. Jadi ada semacam proses sosialisasi politik lingkungan. Pemilih dalam memilih juga tidak memandang uang atau barang sebagai acuan dalam memilih.

Sedangkan analisis dengan metode kuantitatif terdapat 26 responden atau sebesar 66,66 % yang sangat setuju dan setuju sedangkan sebanyak 4 responden atau 10,26% yang bingung/asal mencoblos serta sisanya yaitu sebanyak 9 orang atau sebesar 20,08% menjawab tidak memilih dan sangat tidak

setuju. Hal ini menunjukkan bahwa analisis secara kuantitatif memberi penguatan terhadap analisis kualitatif sehingga penggunaan metode campuran untuk lebih mendapatkan analisis yang sesuai sangat baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Adapun simpulan dari hasil penelitian dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan sosiologis, tidak sedikit pemilih pemula yang menunjukkan model perilaku memilih ini dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Dimana adanya faktor kesamaan daerah masih mempengaruhi perilaku pemilih pemula terhadap seorang kandidat. Selain itu, juga menunjukkan tingkat kesamaan pilihan atau preferensi politik di lingkungan keluarga pemilih pemula.
2. Pendekatan psikologis, dalam penelitian ini pemilih pemula menunjukkan perilakunya dengan mengidentifikasi kandidat dengan penilaian dan sikap. Hal itu, disebabkan adanya keterkaitan atau saling berhubungan antara faktor sosiologis dan psikologis. Dalam proses terbentuknya perilaku ini dilatar belakangi oleh faktor sosiologis. Dimana pemilih pemula dalam menjatuhkan pilihannya mengedepankan persepsi terhadap kandidat dan kemudian menentukan sikap.
3. Pendekatan pilihan rasional, pemilih pemula yang menunjukkan model pilihan rasional dalam penelitian ini adalah mereka yang memilih seorang kandidat dengan melihat program yang ditawarkan kandidat tersebut. Selain melihat program yang ditawarkan juga melihat prestasi, keberhasilan, serta kapasitas kepemimpinan yang dimiliki dari seorang kandidat. Dari hasil penelitian yang dilakukan tidak sedikit diantara pemilih pemula yang menunjukkan model ini. Namun, rasionalitas yang mereka tunjukkan pula tidak lepas dari faktor sosiologis. Dimana informasi yang didapatkan atau diterima pemilih pemula lebih dominan berasal dari argument atau pendapat orang tuanya yang kemudian membentuk perilaku rasional.
4. Kecenderungan Perilaku pemilih pemula Kecamatan Ciomas pada pemilu pada Kabupaten Serang tahun 2015 menunjukkan perilaku pemilih yang sosiologis. Kecenderungan Perilaku pemilih pemula Kecamatan Ciomas dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang kandidat pada pemilu pada Kabupaten Serang tahun 2015 yakni Mereka memilih kandidat dan menjatuhkannya dipengaruhi latar belakang dari lingkungan sosial mereka. Dimana keluarga mempunyai pengaruh besar terhadap pilihan pemilih pemula terhadap seorang kandidat. Kecenderungan ini didasari karena Dari semua informan yang berhasil diwawancarai hampir semua diantaranya memiliki preferensi pilihan yang sama dengan orang tuanya.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Fungsi Partai Politik sebagai wadah pembelajaran politik masyarakat belum berjalan dengan baik dan semestinya hal ini disebabkan karena elitisme pengurus partai, sehingga masyarakat cenderung menghindari partai politik untuk itu pembentukan partai politik harus mengutamakan

kepentingan masyarakat dan negara serta bangsa dengan mencegah kepentingan pribadi atau kelompok dalam menjalankan roda partai serta masih kurangnya peran partai politik dalam mensosialisasikan cerdas dalam memilih kepada pemilih pemula muda khususnya daerah-daerah terpencil.

2. Pencetakan kader partai politik semakin minim, sehingga pemimpin yang dilahirkan partai sangat minim baik dari segi jumlah dan terlebih lagi dari segi kenegarawanannya. Untuk itu partai politik dibentuk semesti dapat melahirkan pemimpin yang berjiwa kenegarawanan yang tinggi serta perlunya diadakan pendidikan politik usia dini bagi remaja umumnya yang akan menginjak usia 17 tahun agar mereka tidak mudah diiming-imingi dan berani menentukan pilihannya sendiri tanpa harus diarahkan oleh orangtuanya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Almond, Gabriel A dan Verba, Sidney, 1984, *Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta, Jakarta
- Daniel S. Salossa, *Mekanisme, Persyaratan dan tata cara Pemilukada langsung*, (Yogyakarta, Media Presindo, 2005)
- Denis Kavanagh, *Political Science and Political Behaviour* (London: Allen and Unwin, 1983)
- Dieter, Roth. 2008. *Studi Pemilu Empiris, Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*. Jakarta: Friedrich-Nauman-Stiftung Die Freiheit.
- Efriza. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. 2012. Bandung: Alfabeta
- Gaffar, Afan. 1992. *Javanese Voters: A Case Study Of Election Under AHegemonis Party System*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan RI No 6 Tahun 2005 Tentang pemilihan, penegasan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- Undang-Undang No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu
- Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah

STRATEGI PENGENDALIAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SUKABUMI

Oleh: **Nur Handayani dan Tumija**
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstract

This study aimed to describe what needs improvement efforts and strategies need to be developed in controlling poverty in Sukabumi.

The method used is descriptive method with qualitative approach. Data were collected using the method of observation, interviews and documentation as well as analyzed through editing, data classification, data tabulation, data tabulation.

The main strategy for poverty reduction in Sukabumi is the expansion of employment and business opportunities, empowerment, capacity building of human resources, social protection, improvement of environmental quality, increased partnerships, population control.

Based on the results of analysis show that efforts need to be enhanced in the implementation of the control strategy of poverty in Sukabumi are: the establishment of the Institute of Microeconomics, adding Development Facility art and culture., utilization kinds of metal and non-metallic minerals, increase the population of cows, chickens and ducks to meet the shortage of meat, milk and eggs, increased production of corn, increasing the role of MCC/TKSM in handling POM and Social Welfare, peningkatam participation of women in society, the addition of educational facilities., adding human resources (medical, non-medical and medical support) and facilities health particularly in hospitals Pelabuhanratu and Jampangkulon, improved coordination in the area of disaster management; increased knowledge to the community in the face of disaster area if at any time there, lowering the number of slum areas merwujudkan appropriate housing.

The strategy needs to be developed in controlling poverty in Sukabumi is added vocational training equipment and add qualified instructors, controlling population growth ', increasing the Human Resources (HR) both farmer groups and government officials that there is to be able to exploit natural resources in accordance with local potentials and local environmental conditions, adding a source providing sufficient irrigation to anticipate the dry season, the increase in the cage and anticipate the H5N1 virus, the addition of agricultural extension workers, additional infrastructure agricultural extension, control over productive land use, agricultural extension budget increase, fisheries and forestry; increase the interest of young people to the field of agriculture, the provision of land for educational purposes.

Keywords: *efforts and poverty control strategy*

PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan dewasa ini, sudah menjadi persoalan serius dan mendesak untuk ditanggulangi karena persoalan kemiskinan dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dalam berbagai aspeknya. Kerentanan yang ditimbulkan akibat kemiskinan tidak hanya berdampak pada lingkungan dan hanya berlangsung pada waktu tertentu semata, namun dapat meluas mempengaruhi ketahanan bangsa dan negara.

Pemerintah Daerah selaku pengemban amanat rakyat harus senantiasa aktif untuk menciptakan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin seperti hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan

layanan dasar yang murah, mudah dan bermutu bagi masyarakat miskin. Kebijakan pemerintah tentunya akan lebih berpihak pada masyarakat miskin yang menjadi prioritas pembangunan di daerahnya dengan menggunakan sumber daya dan sumber dana yang lebih efisien dan efektif

Demikian pula di Kabupaten Sukabumi, kemiskinan merupakan suatu masalah multidimensi memberikan dampak ke berbagai faktor kehidupan. Upaya penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi karena:

1. Menjalankan misi kemakmuran yang bersifat universal, yaitu memanusiakan manusia sesuai hak azasi yang dimilikinya dan agar kehidupan masyarakat menjadi adil dan makmur.
2. Menciptakan keadilan dalam bentuk pemerataan kesempatan kerja, berusaha dan kesempatan kerja hasil pembangunan.
3. Memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi serta mendukung kegiatan ekonomi produktif di Kabupaten Sukabumi.
4. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia di Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengeluarkan masyarakat Sukabumi dari belenggu keterbelakangan.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan pada kewajiban moral dan amanat konstitusi UUD'45 terutama pasal 27, 28 H, 31 dan pasal 34.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi telah dibentuk komite penanggulangan kemiskinan Daerah Kabupaten Sukabumi melalui keputusan Bupati Sukabumi No.412 Tahun 2002. Selanjutnya pada tahun 2011 di bentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukabumi melalui Keputusan Bupati Sukabumi No.050/Keputusan/407 Bappeda/2011.

Pembentukan Tim Koordinasi ini sebagai tindak lanjut dari Permendagri RI No.42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah Kabupaten Sukabumi sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Keanggotaan Tim Koordinasi terdiri dari unsur-unsur pemerintah, masyarakat dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan dari data sukabumikab.bps.go.id/index.php/penduduk-dan-tenaga-kerja jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2011 = 246.108 jiwa (10,33%) dan tahun 2012 = 234.000 jiwa (9,72%). Dari data tersebut dapat diketahui walaupun jumlah jiwa miskin tahun 2012 mengalami penurunan dibanding tahun 2011, namun jumlah kepala keluarga miskin mempunyai kecenderungan meningkat.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sukabumi”.

PERMASALAHAN

Bertolak dari pembatasan masalah yang akan diteliti, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Upaya apa yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan strategi pengendalian kemiskinan di Kabupaten Sukabumi ?
2. Strategi apa yang perlu dikembangkan dalam pengendalian kemiskinan di Kabupaten Sukabumi ?

MAKSUD DAN TUJUAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data, mengidentifikasi data dan menganalisis data yang terkait dengan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan upaya yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan strategi pengendalian kemiskinan di Kabupaten Sukabumi
2. Untuk mendiskripsikan strategi yang perlu dikembangkan dalam pengendalian kemiskinan di Kabupaten Sukabumi

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Strategis

Menurut Ermaya Suradinata (1997:146) Strategi adalah suatu upaya yang dilakukan secara rasional dengan memperhitungkan aspek terkait untuk mencapai suatu tujuan.

Stoner dan Wanber (1993:161) menyatakan bahwa strategi dapat disoroti sekurang-kurangnya dari dua aspek yang berbeda. Perspektif pertama, strategi didefinisikan sebagai program yang luas untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan misinya. Perspektif kedua, strategi adalah pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu.

Selanjutnya menurut Ohmal dalam Salusu (1996:91) strategi merupakan suatu rencana kerja untuk melaksanakan kekuatan suatu pihak dalam menghadapi berbagai kegiatan usaha.

Rumus strategi menurut Hax dan Magluf dalam Salusu (1996:100) adalah sebagai berikut:

1. Suatu pola yang konsisten, menyatu dan integral.
2. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang bertindak dan prioritas alokasi sumber daya.
3. Menyeleksi bidang yang akan digeluti organisasi.
4. Mencoba mendapatkan keuntungan yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi dan kekurangan serta kelemahannya.
5. Kebaikan semua tingkat hierarki dan organisasi.

Lebih lanjut Hax dan Magluf mengemukakan petunjuk pembuatan strategi sukses yaitu sebagai berikut:

1. Strategi harus konsisten dengan lingkungannya.
2. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi.

3. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lainnya.
4. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik yang justru kelemahannya.
5. Sumberdaya dalam suatu strategi adalah suatu yang kritis.
6. Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai.
7. Tanda dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yaang terkait, terutama dari para eksekutif dan dari semua pimpinan unit kerja dalam organisasi.

Dari pendapat di atas maka yang dimaksud dengan strategi penanggulangan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan secara rasional dalam penanggulangan kemiskinan dengan memperhitungkan aspek-aspek terkait untuk mencapai tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan dan agar strategi penanggulangan kemiskinan dapat berhasil (sukseks) maka program penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan secara integratif, partisipatif, aplikatif, ekonomis dan berkesinambungan dengan penekanan pada optimalisasi potensi lokal sesuai kebutuhan masyarakat dan tetap mempertimbangkan kemampuan daerah.

Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari aspek dan dimensi ekonomi semata. Dalam Kamus Bahasa Indonesia karangan WJS Poerwadarminta tahun 2001, kemsikinan diartikan sebagai keadaan tidak berharta benda, serba kurang.

Sementara pada *The Concise Oxford Dictionary* mendefinisikan kata “poor” sebagai “*lacking adequate money or means to live comfortably*”. Dengan pengertian tersebut, harta benda didefinisikan lebih luas lagi tidak sekedar uang semata.

a. Kriteria Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian *World Bank* dalam Jusman (1999:25) rumah tangga miskin pada umumnya adalah rumah tangga yang:

1. Mempunyai anggota rumah tangga banyak.
2. Kepala rumah tangganya merupakan pekerja rumah tangga.
3. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga maupun anggotannya rendah.
4. Sering berubah pekerjaan.
5. Sebagian mereka yang telah bekerja masih mau menerima tambahan pekerjaan lagi bila ditawarkan.
6. Sebagian besar sumber pendapatan utamanya adalah dari sektor pertanian. Di daerah pedesaan rumah tangga yang anggotanya bekerja di sekitar pertanian adalah mereka yang menguasai tanah sangat marginal (tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan rumah taangga).
7. Kondisi tempat tinggal masih memprihatinkan terutama dalam hal penyediaan air bersih dan listrik untuk penerangan.

Pada tahun 1982, Prof. Dr. Emil Salim, dalam Jusman (1999:27) mengemukakan lima ciri mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu sebagai berikut:

1. Pada umumnya mereka tidak memiliki faktor produksi seperti: tanah, modal, ataupun keterampilan yang cukup, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
2. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.
3. Tingkat pendidikannya rendah, tidak sampai tamat Sekolah Dasar, waktu mereka tersisa habis untuk mencari nafkah dan mendapatkan tambahan penghasilan.
4. Kebanyakan mereka tinggal di pedesaan, tidak memiliki tanah dan walaupun ada sangat kecil. Pada umumnya mereka menjadi buruh atau pekerja kasar di luar sektor pertanian. Kesenambungan kerja kurang terjamin karena mereka bekerja sebagai buruh musiman dengan upah yang sangat rendah. Tidak sedikit jumlah mereka yang menjadi pekerja bebas dalam usaha apa saja (sektor informal).
5. Mereka yang hidup di tengah kota masih berusia muda dan tidak didukung sengan keterampilan yang memadai.

b. Indikator Kemiskinan

Selanjutnya indikator kemiskinan yang sering dijadikan acuan bagi kepentingan pemerintah adalah indikator versi BKKBN yang memuat pentahapan tingkat kesejahteraan masyarakat atau keluarga dalam lima kelompok yaitu sebagai berikut:

a. Keluarga Pra-Sejahtera

Yaitu keluarga-keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara maksimal seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan dan kesehatan.

Indikator keluarga Pra-Sejahtera adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi salah satu atau lebih indikator Keluarga Sejahtera I.

b. Keluarga Sejahtera I

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

Indikator keluarga sejahtera I adalah:

1. Melaksanakan ibadah
2. Makan dua kali sehari atau lebih
3. Memiliki berbeda untuk berbagai aktivitas
4. Bagian terluas lantai rumah bukab dari tanah
5. Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan

c. Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya seperti kebutuhan menabung dan memperoleh informasi.

Indikator untuk Keluarga Sejahtera II adalah:

1. Ibadah secara teratur
2. Mampu memakan daging/telur/ikan satu kali seminggu
3. Mampu mengadakan minimal satu stel pakaian baru setahun
4. Luas tanah/rumah rata-rata 5 m² perjiwa
5. Sehat dalam 3 bulan terakhir
6. Punya penghasilan tetap
7. Usia 10-60 tahun bisa baca tulis huruf latin
8. Usia 7-15 tahun bersekolah
9. Jumlah anak lebih dari 2 dan berKB

d. Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga-keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan/kontribusi yang maksimal kepada masyarakat seperti memberikan sumbangan sesuatu dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan dan sebagainya.

Indikator Keluarga Sejahtera III adalah:

1. Mampu meningkatkan pengetahuan tentang agama
2. Mampu menabung sebagai penghasilannya
3. Dapat makan bersama keluarga sekaligus berkomunikasi
4. Ikut kegiatan masyarakat di tempat tinggal
5. Rekreasi bersama minimal satu kali dalam enam bulan
6. Mampu memperoleh informasi
7. Mampu dan memiliki sarana transportasi

e. Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya dan kebutuhan pengembangan serta dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan kepada masyarakat.

Indikator Keluarga Sejahtera III Plus adalah:

1. Secara sukarela memberikan sumbangan secara teratur
2. Aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan instansi

c. *Penyebab Kemiskinan*

Selanjutnya Tjahya Supriatna (1997-20) menyatakan bahwa kondisi penduduk miskin disebabkan oleh:

1. Faktor penduduk yang terpuruk ke dalam lembah kemiskinan akibat dampak ketidakmerataan hasil pembangunan.

2. Sikap mental penduduk yang mengalami kemiskinan secara alamiah maupun kultural.
3. Kemiskinan alamiah ini ditunjukkan oleh situasi lingkaran ketidakberdayaan mereka yang bersumber dari rendahnya tingkat pendidikan, pendapatan, kesehatan dan gizi, produktivitas, penguasaan modal, keterampilan dan teknologi serta hambatan infrastruktur maupun etnis sosial lainnya.

Selanjutnya menurut Jusman (1999:9) kemiskinan yang terjadi di Jawa Barat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain: kualitas sumber daya manusia, kesempatan kerja dan infrastruktur yang mendukung kelangsungan hidup mereka. Kondisi infrastruktur dapat dilihat dari banyaknya desa yang tertinggal.

Selanjutnya faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan menurut Harry Hikmat dalam Muhammad Hafsah (2008:32) dapat dikategorikan dalam dua hal sebagai berikut:

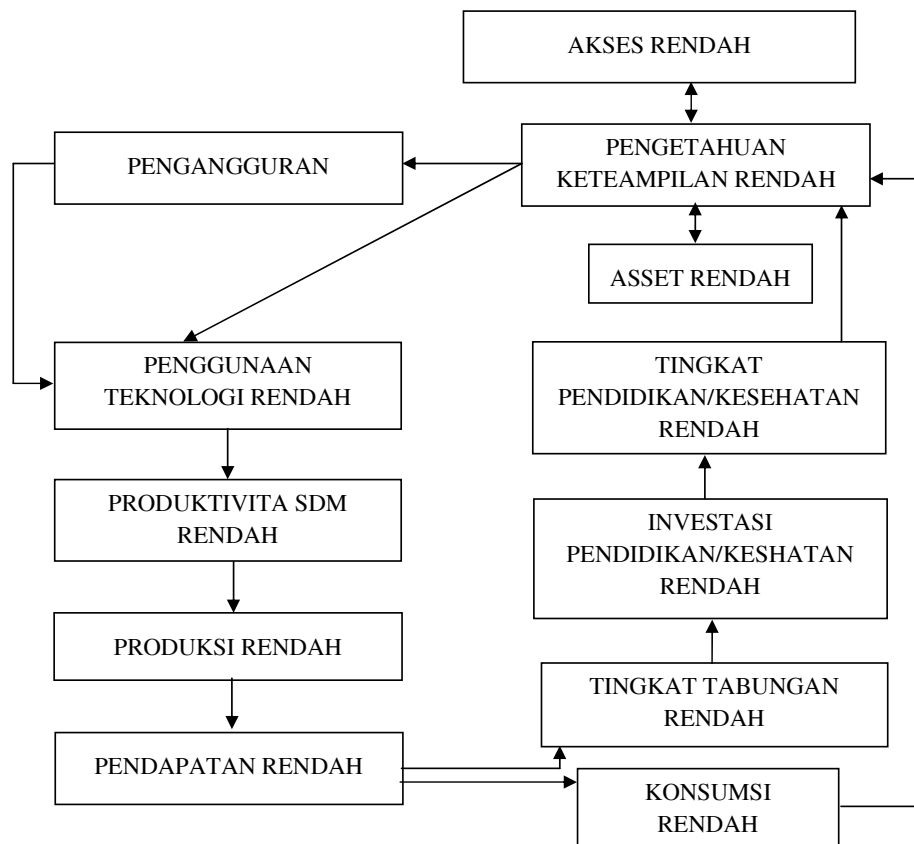
a. Faktor Internal

Faktor-faktor internal (dari dalam individu atau keluarga fakir miskin) yang menyebabkan terjadinya kemiskinan antara lain berupa kekurangan maupun

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal (berada di luar individu atau keluarga yang menyebabkan terjadinya kemiskinan)

Akibat faktor internal dan eksternal tersebut mendorong orang-orang miskin masuk ke dalam perangkap lingkaran kemiskinan (*poverty circletrap*) seperti gambar berikut:



Gambar 1
Penyebab Kemsikinan

Kerangka Pemikiran

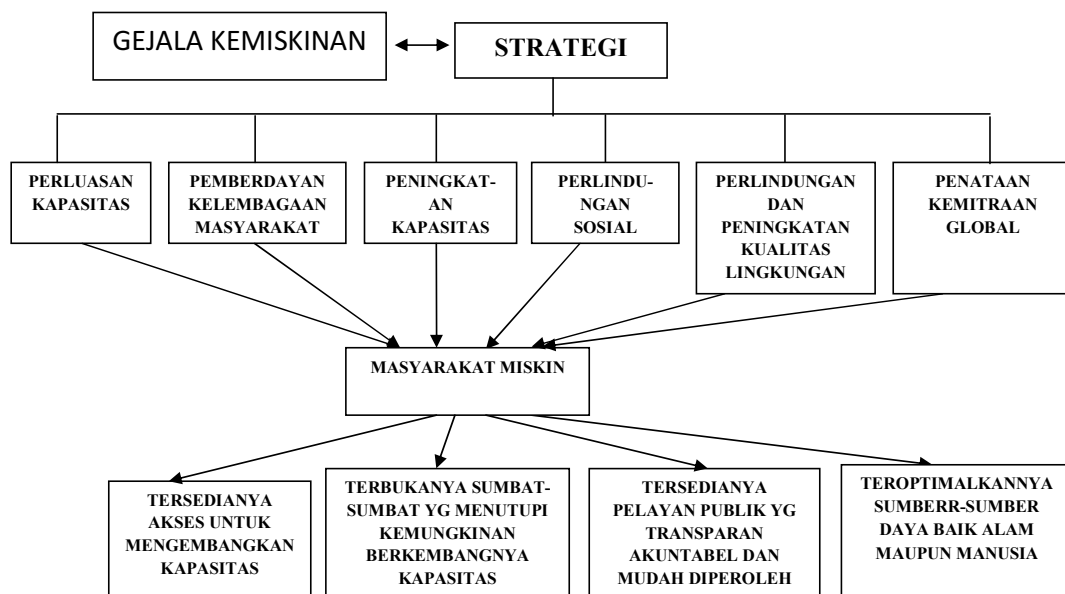
Kemiskinan telah diketahui sebagai suatu masalah multidimensi dan memberikan dampak ke berbagai sektor kehidupan. Karena itu strategi penanggulangan kemiskinan semaksimal mungkin dilakukan melalui pendekatan yang terpadu, pelaksanaan yang bertahap, terencana, dan berkesibambungan serta menuntut keterlibatan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi masyarakat maupun masyarakat miskin itu sendiri.

Pemerintah Daerah selaku salah satu pengemban amanat rakyat harus senantiasa aktif untuk menciptakan perluasan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin seperti hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan, kesehatan dll.

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan layanan dasar yang murah, mudah dan bermutu bagi masyarakat miskin. Kebijakan pemerintah harus perpihak pada masyarakat miskin yang menjadi prioritas pembangunan di daerahnya dengan menggunakan sumber daya dan sumber dana yang lebih efisien dan efektif.

Dengan demikian secara umum tujuan penanggulangan kemiskinan adalah menjamin penghormatan, perlu dengan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap yang terwujud dalam kehidupan yang layak dan bermartabat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka konsep pemikiran dari Strategi Penanggulangan Kemiskinan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2
Kerangka Pemikiran Strategi Pengendalian Kemiskinan

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Pemilihan suatu desain penelitian yang sesuai sangat penting untuk keberhasilan proyek suatu penelitian. Weber (2006:167) mengatakan bahwa Desain penelitian adalah rencana dan struktur

penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Rencana itu merupakan suatu skema menyeluruh yang mencakup program penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian secara sistematis, faktual dan akurat kemudian menarik simpulan umum atas dasar data-data atau faktor-faktor yang bersifat khusus dari masalah yang dihadapi.

Menurut Lincoln and Guba dalam Sugiyono (2013:306) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:

“The instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. We shall see that other forms of instrumentation may be used in later phases of the inquiry, but the human instrument has been used extensively in earlier stages of inquiry, so that an instrument can be constructed that is grounded in the data that the human instrument has produced.”

Lingkup Operasional Penelitian

Lingkup operasional penelitian dalam penelitian ini adalah analisis dari strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi yang dilakukan secara rasional oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi dengan memperhitungkan berbagai aspek terkait untuk mencapai tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan.

Sumber Data Penelitian

Menurut Catherine Marshall, Gretchen B. Rosman dalam Sugiyono (2013:312) menyatakan bahwa, *“The fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review”*

Selanjutnya dikatakan menurut Sugiyono (2014:137) bahwa sumber data diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:

1. *Person*, yaitu sumber data yang bias memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
2. *Place*, adalah sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak.
3. *Paper*, yaitu data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau symbol-simbol lain.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan peneliti yaitu buku-buku, peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman yang terkait dengan pelaksanaan program Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara (interview)

Menurut Esterberg dalam Sugiono (2007:72) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

b. Teknik Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diselidiki melalui observasi dilakukan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian dengan maksud untuk memperoleh gambaran nyata tentang kegiatan serta gejala yang ingin ditemukan pada obyek penelitian.

c. Dokumentasi

Arikunto (2006:236) mengemukakan bahwa studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.

Dalam melaksanakan metode ini penulis melakukan penelitian melalui benda-benda tertulis antara lain seperti buku-buku, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, laporan-laporan, arsip-arsip dan sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan program terkait Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul (Sugiono, 2004:169). Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu penelitian atau pengecekan data-data yang masuk mengenai kelengkapan dan keterkaitan dengan permasalahan yang ada. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap dan akurat sesuai dengan yang diinginkan.

b. Klasifikasi Data

Yaitu kegiatan mengatur, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkatagorisasikannya sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga akan mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

c. Tabulasi Data

Yaitu kegiatan merumuskan data ke dalam bentuk tabel atau grafik. Data yang terkumpul dan bertumpuk-tumpuk serta uraian yang sulit dipahami dan diterjemahkan, diperlukan tabulasi sehingga data yang ada mudah dipahami dan dianalisis oleh peneliti.

d. Interpretasi data

Data yang telah dimasukkan ke dalam tabel (tabulasi) kemudian dicari makna atau artinya yang lebih luas dari data, dan selanjutnya diolah dengan menghubungkan pada ilmu pengetahuan atau hasil penelitian yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis Lokasi Penelitian

Kabupaten Sukabumi terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat dengan jarak tempuh 96 km dari ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 119 km dari Ibukota Negara (Jakarta). Secara geografis

wilayah Kabupaten Sukabumi terletak diantara 6o 57'1" - 7o 25'1" Lintang Selatan dan 106o 49'1" - 107o 00'1" Bujur Timur, dan mempunyai luas wilayah 4.162 km atau 14,39 % dari luas Jawa Barat atau 3,01%. Dari luas Pulau Jawa (Pemda Sukabumi, 2013).

Kabupaten Sukabumi batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bogor.
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia.
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan Samudra Indonesia.
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.
- Selain itu secara administratif Kabupaten Sukabumi juga berbatasan secara langsung dengan wilayah Kota Sukabumi yang merupakan daerah kantong (enclave) dikelilingi beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Sukabumi di Sebelah Utara, Kecamatan Cisaat, dan Kecamatan Gunung Guruh di sebelah barat, Kecamatan Nyalindung di sebelah selatan, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Kebon Pedes di sebelah timur.

Kabupaten Sukabumi beriklim tropis dengan suhu udara berkisar 19,7^o-31,3^oC dan kelembaban rata-rata sebesar 86.2 %. Udara yang cukup hangat tersaji hampir setiap tahunnya. Pada tahun 2011 curah hujan yang tertinggi tercatat di pusat pemantauan goalpara terjadi pada bulan Februari dengan curah hujan 640 mm dan terjadi selama 25 hari sedangkan curah hujan terkecil terjadi di bulan Agustus sebesar 1.0 mm.

Adapun potensi geologis Kabupaten Sukabumi yang sudah dimanfaatkan antara lain sumber panas bumi di daerah Gunung Salak dan Cisolok, bahan tambang dan bahan galian emas, perak dan batubara, pasir koarsa, marmer, pasir hitam, bentorit, teras, batu gamping, tanah liat dan lain-lain.

Kondisi Demografis

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, sampai akhir Desember 2012 penduduk Kabupaten Sukabumi berjumlah 2.471.803 jiwa yang terdiri dari 1265.209 laki-laki dan 1.206.594 perempuan dengan kepadatan penduduk sebesar 578 Orang per km² dan jumlah KK sebanyak 693.547 KK.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui program Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha. Program yang dilaksanakan oleh berbagai Instansi di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi ini pada umumnya mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa program bahkan berhasil melampaui target kinerja (>100%) antara lain:

- Peluang kerja disektor pertanian (308%)
- Penempatan para pencari kerja (178,63%)

- Realisasi PMDN dan PMA (>100%)
- Peningkata Usaha Ekonomi Desa (267%)
- Peningkatan pemanfaatan lahan (1.115%)
- Pengembangan pasar dan obyek pariwisata (116–128%)

Beberapa program belum dapat atau masih kecil dalam mencapai target kinerja antara lain:

- Pendirian Lembaga Ekonomi Mikro (0%)
- Sarana Pengembangan seni budaya (0%)
- Pemanfaatan jenis mineral logam dan non logam (3,57%).

Dalam program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, permasalahan yang dihadapi Badan Pendidikan dan Pelatihan antara lain:

1. Ketersediaan peralatan latihan kerja yang relatif sudah tidak memadai karena sebagian besar merupakan hasil pengadaan tahun 1990
2. Keterbatasan jumlah instruktur latihan kerja.

Menurut Pemda Kabupaten Sukabumi (2014), solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain melaksanakan Outsorching terhadap SDM yang terlatih.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan dapat menyerap tenaga kerja yang banyak, meliputi sektor Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan, Ketuhanan dan Perikanan dan Kelautan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Kabupaten Sukabumi yang luas wilayahnya merupakan daerah terluas di Jawa dan Bali (terdiri dari 47 Kecamatan dan 367 Desa/Kelurahan) serta tingginya populasi jumlah penduduk menyebabkan tumbuh dan berkembangnya permasalahan ketahanan pangan berpotensi terjadinya rawan pangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, budaya, politik, etnis, agama, penyimpangan perilaku, hukum dsb.
2. Belum optimalnya peran aktif potensi sumber kelompok Tani dalam membantu penanganan permasalahan ketahanan pangan. Hal ini disebabkan kurang/terbatasnya wawasan pengetahuan maupun kemampuan material dalam pemanfaatan sumber daya alam berbasis potensi lokal dan lingkungannya.
3. Masih rendahnya pemahaaman/pengetahuan mengenai permasalahan ketahanan pangan yang dimiliki baik oleh aparatur pemerintah maupun masyarakat khususnya kalangan yang berpotensi sebagai mitra kerja BKP (Badan Ketahanan Pangan).

Menurut Pemda Kabupaten Sukabumi (2014) solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Menentukan skala prioritas baik lokasi maupun jumlah besaran anggaran yang digunakan pada setiap kegiatan dan memberikan bantuan penunjang dalam rangka meningkatkan kemampuan, tenaga/sumber daya manusia dan sarana prasarana yang terdapat di lokasi guna meningkatkan pelayanan ketahanan pangan.
2. Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat khususnya kalangan masyarakat yang merupakan indikasi rawan pangan di wilayah Kabupaten Sukabumi.

3. Menggali anggaran selain dari APBD Kabupaten Sukaabumi juga dari APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN walaupun bentuknya merupakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
4. Meningkatkan kemampuan dan pembinaan terhadap berbagai kategori yang berkaitan dengan peningkatan ketahanan pangan.

Program Peningkatan Produksi Pangan

Peningkatan produksi pangan disamping mampu menyerap tenaga kerja petani juga untuk mencegah terjadinya rawan pangan. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Produksi Peternakan:
 - Produksi telur tidak mencapai target tahun 2013 karena terjadinya kemarau yang cukup panjang sehingga peternak pada umumnya mengurangi populasi akibat ketersediaan air berkurang dan mutu baku air rendah.
 - Produksi daging tidak mencapai target tahun 2013 karena pada tahun tersebut terjadi pengurangan/penurunan populasi sapi potong akibat pembatasan sapi impor sehingga sapi lokal banyak yang dipotong.
 - Produksi susu tahun 2013 mengalami penurunan karena terjadi penurunan populasi sapi perah akibat banyak yang dipotong karena harga daging mahal.
 - Produksi ayam dan itik mengalami penurunan karena pada tahun 2013 terjadi serangan virus H5N1.
2. Produksi Tanaman Pangan
 - Produksi dan ketersediaan jagung tidak mencapai target karena areal tanaman jagung dipanen muda disebabkan faktor harga dan terdesak kebutuhan mengakibatkan banyak petani yang melakukan panen jagung muda sehingga produksi jagung pipilan kering tidak mencapai target.
3. Produksi Perikanan/Kelautan
 - Penghitungan peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan masih berdasarkan pendapatan kotor, sehingga belum mencerminkan Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Ikan.

Menurut Pemda Kabupaten Sukabumi (2014) solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Peningkatan pembinaan kepada peternak ayam buras untuk menerapkan *Good Farming Practice* dan memanfaatkan pakan sumberdaya lokal sehingga dapat menekan harga pakan.
2. Penerapan program swasemada daging sapi dan kerbau (PSDSK) dengan fokus antara lain penyediaan bibit sapi potong.
3. Pembinaan insentif pada peternak sapi perah dan memberikan bantuan bibit ternak sapi perah melalui Tugas Pembantuan APBN maupun APBD sehingga peternak yang telah menjual ternaknya tetap menjadi peternak sapi perah.
4. Peningkatan kewaspadaan terhadap penyakit antara lain melalui pengamatan, pengawasan dan pencegahan.

Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemda Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat. Program yang dilaksanakan oleh berbagai instansi di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi ini pada umumnya mencapai target yang telah ditentukan.

Beberapa program bahkan berhasil melampaui target (>100%) antara lain:

1. Peningkatan partisipasi pembangunan di Kecamatan (167%)
2. Penguatan perempuan Kepala Keluarga (184%)
3. Pemberdayaan SDM Kelautan dan Perikanan (156,8–285,7%)
4. Pemberdayaan Masyarakat Kehutanan (185%)

Beberapa program belum dapat mencapai target kinerja antara lain:

1. Peningkatan peran PKS/TKSM dalam penanganan PMKS dan Kesos (42%)
2. Peningkatan partisipasi perempuan di masyarakat (19,2%)

Beberapa kendala yang dihadapi dalam program Pemberdayaan Masyarakat antara lain dalam pemberdayaan SDM di bidang pertanian yang terkait dengan pemberdayaan pelaku utama (petani) dan pelaku usaha pertanian, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah desa serta jumlah petani yang cukup banyak belum seimbang dengan jumlah penyuluh.
2. Banyaknya penyuluh yang pensiun dan penyuluh yang beralih ke jabatan struktural sehingga menghambat kinerja penyelegaraan penyuluhan.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penyuluhan.
4. Alih fungsi lahan produktif yang tidak terkendali, sehingga menghambat kinerja penyuluhan.
5. Rendahnya anggaran untuk peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di tengah berkembangnya teknologi dan informasi secara pesat.
6. Rendahnya minat generasi muda untuk menekuni bidang pertanian.

Menurut Pemda Kabupaten Sukabumi (2014) solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Pemberdayaan penyuluh swadaya dan penyuluh swasta.
2. Pengangkatan penyuluh PNS baru yang dibantu dengan penyuluh THL-TBPP Pusat dan Provinsi.
3. Penyelenggaraan penyuluhan melalui media radio (siaran pedesaan) sehingga menjangkau seluruh pelosok.
4. Membentuk POSLUHDES ditingkat desa sebagai *home base* di semua teknologi dan informasi di tingkat desa.
5. Penambahan sarana dan prasarana penyuluhan.

Selanjutnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat, Pemda Kabupaten Sukabumi juga melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Tujuan umum dari PNPM adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, sedangkan tujuan khusus dari PNPM antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
2. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan pengajaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).
3. Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
4. Meningkatkan keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

Program PNPM di Kabupaten Sukabumi terdiri atas PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dan PNPM Mandiri Perdesaan, dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

1. PNPM Mandiri Perkotaan

Program ini semula merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan pada tahun 2004 P2KP tersebut menjadi PNPM Mandiri Perkotaan dan Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu Kabupaten yang mendapatkan PNPM-MP mulai tahun 2008.

Pada tahun anggaran 2013 lokasi PNPM-MP di Kabupaten Sukabumi sebanyak 6 kecamatan yang mencakup 58 desa/kelurahan, yaitu Kecamatan Sukaraja (9 desa), Kecamatan Sukabumi (6 desa) Kecamatan Cisaat (13 desa), Kecamatan Cicantayan (7 desa), Kecamatan Cibadak (10 desa/kel) dan Kecamatan Cicurug (13 desa) dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 7.768.750.000,- yang bersumber dari:

- BLM Reguler (APBN) : Rp. 5.325.000.000,-
- BLM Reguler Shering Pemda (APBD) : Rp. 443.750.000,-
- BLM Replika Paket (APBD) : Rp. 2.000.000.000,-
- Bantuan Biaya Operasional (BOP) BKM : Rp. 580.000.000,-

2. PNPM Mandiri Perdesaan

Pada tahun 2013 Kabupaten Sukabumi melaksanakan Program PNPM Mandiri Perdesaan di 41 Kecamatan dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 55.250.000.000,- dengan rincian Rp. 52.250.000.000,- bersumber dari APBN dan Rp. 2.750.000,- bersumber dari *Cost Sharring* APBD Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB).

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana Surat Penetapan Camat (SPC) tahun 2013 terdiri 587 usulan yang mencakup 1.767 unit dalam 13 kelompok kegiatan, yaitu:

- Perbaikan jalan dusun dengan Telford
- Pembuatan jembatan beton untuk roda empat
- Pembuatan bendung sederhana

- Peningkatan gedung PAUD
- Pembuaataan gedung Posyandu
- Pembuaataan perpustakaan
- Pembuatan bangunan MCK
- Pembuatan tembok penahan tanah
- Pembuatan prasarana pendidikan
- Mebel sekolah
- Mebel di tempat kesehatan
- Simpan pinjam kelompok perempuan
- Peningkatan kapasitas kelompok

Program Peningkatan Kapasitas SDM

Pemda Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui program Peningkatan Kapasitas SDM.

Program ini dilaksanakan oleh Instansi di lingkungan pemda Kabupaten Sukabumi khsusnya yang terkait dengan bidang pendidikan dan kesehatan. Secara umum Program Peningkatan Kapaitas SDM di bidang pendidikan sebagian besar belum mrncapai target kinerja, sedangkan di bidng kesehatan sebagian besar mencapai target kinerja.

Di bidang pendidikan kegiatan fisik sekolah (pembangunan ruang kelas, rehabilitasi, pemagaran) dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah banyak yang tidak mencapai target, penyebabnya antara lain:

1. Tebatasnya lahan yang tersedia
2. Tebatasnya waktu yang tersedia
3. Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasinya
4. Dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas
5. Dan lain-lain.

Di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin (JAMKESDA dan JAMKESMAS) dilaksanakan melalui 4 kegiatan, yaitu:

1. Pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakaat miskin, keluaran dari kegiatan ini antara lain:
 - Monitoring pelayanan kesehatan masyarakaat miskin, dengan realisasi 58 Puskesmas.
 - Pengadaan dan pendistribusian kartu Jamkesda dan Jamkesmas, dengan realisasi 200.000 lembar.
 - Pelatihan sistem rujukan dan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin bagi kader Posyandu.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar bagi masyarakat miskin, keluaran dari kegiatan ini antara lain:

- Pelayanan kesehatan masyarakat miskin, dengan realisasi 10.324 kasus.
- Tersedianya bantuan keuangan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas, dengan realisasi 345.360 kasus.

2. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas, Keluaran dari kegiatan ini antara lain tersedianya bantuan keuangan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas yang memerlukan bantuan perawatan, dengan realisasi 3.000 kasus.
3. Integrasi Sistem Informal dan Website Jampersal, keluaran dari kegiatan ini antara lain terintegrasi software Jampersal, dengan realisasi 58 Puskesmas.

Kendala yang dihadapi di bidang kesehatan terutama terdapat di lingkungan RSUD Pelabuhanratu dan RSUD Jampangkulon antara lain:

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai
2. Sumber Daya Manusia (Medis, Non Medis, Penunjang Medis) belum sesuai dengan kebutuhan terutama dokter spesialis.
3. Di lingkungan RSUD Jampangkulon dari jumlah penduduk miskin Kabupaten Sukabumi wilayah VI dan sebagian wilayah VII sebanyak 423.517 jiwa, hanya 166.698 jiwa atau 36,6% yang mendapatkan bantuan kesehatan oleh Jamkesmas dan Jamkesda, sedangkan anggaran hanya mampu untuk melayani 1.142 pasien keluarga miskin.

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh RSUD dalam mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Mengajukan usulan kebutuhan sarana dan prasarana serta kebutuhan tenaga medis, non medis dan penunjang medis ke Pemda Kabupaten Sukabumi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat maupun ke Kementerian Kesehatan RI.
2. Meningkatkan promosi kesehatan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan pendidikan dan kompetensi sumber daya serta menggalakkan profesionalisme dan loyalitas karyawan.

Program Perlindungan Sosial

Pemda Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan program perlindungan sosial untuk menanggulangi kemiskinan. Program ini dilaksanakan oleh instansi di lingkungan Pemda Sukabumi khususnya oleh Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Secara umum program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial telah mencapai target kinerja, bahkan kegiatan/program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta Program Perlindungan fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melampaui target yang telah ditentukan (>100%). Demikian pula program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh BPBD sebagian besar telah mencapai target kinerja.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam Program Perlindungan Sosial ini terutama terkait dengan penanggulangan bencana oleh BPBD, yaitu antara lain:

1. Kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kejadian bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan korban jiwa dan kerusakan.
2. Meskipun perencanaan pembangunan telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bahaya, namun dalam kenyataan pelaksanaannya di lapangan. Upaya penanganan ini masih belum sistemik dan kurang koordinasi.

Menurut Pemkab Kabupaten Sukabumi (2014) solusi untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kordinasi antara semua pelaku penanggulangan bencana
2. Mengisi kekurangan pegawai di BPBD dan meningkatkan kemampuannya melalui diklat terkait penanggulangan bencana sehingga dapat bekerja secara profesional.

g. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pemda Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui program Peningkatan Kualitas Lingkungan. Program ini dilaksanakan oleh instansi di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi, dan secara umum sebagian besar telah mencapai target yang telah ditentukan.

Beberapa program bahkan berhasil melampaui target (>100%) antara lain:

1. Tertanggulangnya titik genangan dalam Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan (164,47%)
2. Jumlah desa terlayani dalam Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah (210%)
3. Cakupan jamban keluarga alam Program Pengembangan Lingkungan Sehat (101,52)
4. Jalan lingkungan ber kondisi baik (100,52%)
5. Terbangunnya jalan desa (102,9%)
6. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (110%)

Sedangkan program yang belum mencapai target antara lain:

1. Penurunan jumlah kawasan perumahan kumuh (0%)
2. Terwujudnya rumah layak huni (14,02%)

Beberapa kendala yang dihadapi dalam Program Peningkatan Kualitas Lingkungan terutama terkait dalam Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan/Permukiman serta Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan/Permukiman

Kendala yang dihadapi antara lain:

- Belum tersedianya data base lingkungan kumuh dan masyarakat yang mendiami rumah tidak layak huni.
- Belum tersedianya data base Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat yang mengalami keterbatasan atau rawan air bersih.
- Belum tersedianya data base permukiman, diantaranya data base jalan lingkungan, drainase, jumlah titik genangan dan rumah layak huni.

Menurut Pemda Kabupaten Sukabumi (2014) solusi untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
- Mengalokasikan anggaran sesuai rencana dan program berdasarkan data base yang telah disusun.

2. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kendala yang dihadapi antara lain:

- Belum tersedianya data base masyarakat rawan air minum, rawan air bersih dan rawan sanitasi.
- Belum tersedianya Master Plan air bersih, air limbah, dan drainase.
- Belum tersedianya Rencana Teknis Drainase sebagai turunan dari Rencana Induk Drainase kawasan.
- Banyaknya penyimpangan penggunaan Ruang Milik Jalan (RMJ) seperti permukiman yang merapat ke jalan dan lain-lain yang membuat saluran drainase terhalang bahkan tertutup akibatnya banyak sistem drainase jalan yang tidak berfungsi dengan baik.
- Belum optimalnya penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.

Menurut Pemda Kabupaten Sukabumi (2014) solusi untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Penyusunan Master Plan air bersih, air limbah dan drainase.
- Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah dan air minum.
- Penyusunan RDTR agar penyusunan Rencana Induk dan Rencana Teknis Drainase Kawasan dapat segera dilaksanakan.
- Mengoptimalkan fungsi drainase jalan dengan cara memperketat pengendalian dan pengawasan IMB serta memberikan pengertian dan sosialisasi RMJ.
- Peningkatan Pengelolaan dan Penataan Ruang Tebuka Hijau.

Program Pengendalian Penduduk

Pemda Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui Program Pengendalian penduduk. Program ini dilaksanakan oleh instansi di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi khususnya oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Perogram Pengendalian Penduduk yang dilaksanakan oleh BKKBD tahun 2013 realisasinya belum mencapai target yang telah ditentukan. Realisasi yang cukup besar dan hampir mencapai target yaitu jumlah prevalansi peserta KB aktif (95,33%) dan cakupan peserta KB aktif (88,35%).

Sedangkan program transmigrasi khususnya jumlah KK transmigrasi yang diberangkatkan pada tahun berjalan realisasinya telah melampaui target (154,32%).

Beberapa kendala yang dihadapi dalam Program Pengendalian Penduduk terkait pada pelaksanaan Program Keluarga Berencana yaitu sebagai berikut:

1. Biaya operasional petugas lapangan non PNS masih relatif terlalu kecil belum sesuai dengan beban tugas.
2. Masih rendahnya pencapaian peserta KB aktif pria karena kurangnya kesadaran kaum pria menjadi peserta KB (Medis Operasi Pria dan Kondom).
3. Tenaga yang ada di lapangan tidak sebanding dengan desa/kelurahan yang ada, dari 368 desa yang ada tenaga lapangan KB PNS hanya berkisar 105 orang.

Menurut Pemda Kabupaten Sukabumi (2014) solusi untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja untuk petugas lapangan, maka telah dianggarkan honorarium Tenaga Penyuluh Penggerak Desa dalam anggaran tahun 2014 sebagai penggerak dan pendorong kegiatan-kegiatan operasional lini lapangan, sehingga diharapkan mekanisme operasional pada tingkat lini lapangan akan lebih optimal pada 368 desa.
2. Dalam meningkatkan pencapaian peserta KB Aktif pria dilakukan penyuluhan pada saat pelayanan KB, pembinaan KB dan penyuluhan pada momen strategis pada momen pertemuan multi pihak di setiap kecamatan bersama PKK, dinas Kesehatan, TNI, dan Instansi terkait lainnya.

Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2013, perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukabumi tahun 2011–2013 yaitu tahun 2011 = 13,46%, tahun 2012 = 13,01%, dan tahun 2013 = 12,57%.

Dari data-data tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan pada tahun 2013 telah mampu memperkecil jumlah penduduk miskin sebesar 0,44% yaitu dari 13,01% pada tahun 2012 menjadi 12,57% pada tahun 2013.

Penurunan jumlah penduduk miskin ini relatif masih kecil bahkan lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2012) sebesar 0,45% yaitu dari 13,46% pada tahun 2011 menjadi 13,01% pada tahun 2012. Karena itu perlu dilakukan penanggulangan kemiskinan yang lebih intensif dan terkoordinasi dari seluruh aparat (SKPD) dan partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi.

a. Upaya yang perlu ditingkatkan dalam Pengendalian Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, upaya yang perlu ditingkatkan dalam pengendalian kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha, upaya yang perlu ditingkatkan:
 1. Pendirian Lembaga Ekonomi Mikro mengingat program ini belum tercapai dan target yang diperoleh masih 0%
 2. Penambahan Sarana Pengembangan seni budaya mengingat program ini belum tercapai dan target yang diperoleh masih 0%
 3. Pemanfaatan jenis mineral logam dan non logam mengingat program ini target yang diperoleh baru sebesar 3,57%
- b. Dalam peningkatan ketahanan pangan, upaya yang perlu ditingkatkan adalah:
 1. Menambah populasi sapi, ayam dan itik untuk memenuhi kekurangan daging, susu dan telur
 2. Peningkatan produksi jagung pipilan.
- c. Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat, upaya yang perlu ditingkatkan adalah:
 1. Peningkatan peran PKS/TKSM dalam penanganan PMKS dan Kesos mengingat program ini target yang diperoleh baru sebesar 42%.

2. Peningkatam partisipasi perempuan di masyarakat mengingat program ini target yang diperoleh baru sebesar 19,2%.
- d. Dalam program peningkatan kapasitas SDM, upaya yang perlu ditingkatkan adalah:
 1. penambahan sarana dan prasarana pendidikan;
 2. menambah SDM (medis, non-medis dan penunjang medis) serta sarana dan prasarana kesehatan khususnya di RSUD Pelabuhanratu dan Jampangkulon.
- e. Dalam program Perlindungan Sosial, upaya yang perlu ditingkatkan adalah:
 1. peningkatan koordinasi dalam penanggulangan bencana daerah;
 2. peningkatan pengetahuan kepada masyarakat dalam menghadapi bencana daerah jika sewaktu-waktu terjadi.
- f. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan, upaya yang perlu ditingkatkan adalah:
 1. Menurunkan jumlah kawasan perumahan kumuh mengingat program ini belum tercapai dan target yang diperoleh masih 0%
 2. Merwujudkan rumah layak huni mengingat target yang diperoleh masih program ini baru 14,02%

b. Strategi yang perlu ditingkatkan dalam Pengendalian Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam pembahasan tersebut di atas strategi yang perlu ditingkatkan dalam pengendalian kemiskinan di Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Dalam program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, strategi yang perlu ditingkatkan adalah dengan menambahkan peralatan latihan kerja dan menambah instruktur yang berkualitas.
- b. Dalam Program Peningkatan Ketahanan pangan strategi yang perlu ditingkatkan adalah:
 1. pengendalian pertumbuhan penduduk
 2. meningkatkan pengetahuan, keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kelompok tani maupun aparatur pemerintah yang ada agar mampu memanfaatkan SDA sesuai dengan potensi lokal dan kondisi lingkungan setempat.
 3. menambah sumber penyediaan irigasi yang cukup untukantisipasi musim kemarau.
 4. Peningkatan kebersihan kandang dan mengantisipasi virus H5N1.
- c. Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di bidang pertanian strategi yang perlu ditingkatkan adalah:
 1. Penambahan tenaga penyuluh pertanian;
 2. Penambahan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
 3. Pengendalian alih fungsi lahan produktif.
 4. Peningkatan anggaran penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 5. Meningkatkan minat generasi muda untuk menekuni bidang pertanian
- d. Dalam program peningkatan kapasitas SDM strategi yang perlu ditingkatkan adalah:
 1. Penyediaan lahan untuk keperluan pendidikan, penanggulangan bencana daerah

- Pengalokasian dana pendidikan dan kesehatan,
- 2. Menambah tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan.
- e. Dalam program Perlindungan Sosial, strategi yang perlu ditingkatkan adalah melaksanakan program penanggulangan bencana daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
- f. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan strategi yang perlu ditingkatkan adalah:
 - 1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup sehat,
 - 2. Sosialisasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

- a. Upaya yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan strategi pengendalian kemiskinan di Kabupaten Sukabumi adalah:
 - 1. Pendirian Lembaga Ekonomi Mikro.
 - 2. Penambahan Sarana Pengembangan seni budaya.
 - 3. Pemanfaatan jenis mineral logam dan non logam.
 - 4. Menambah populasi sapi, ayam dan itik untuk memenuhi kekurangan daging, susu dan telur.
 - 5. Peningkatan produksi jagung pipilan.
 - 6. Peningkatan peran PKS/TKSM dalam penanganan PMKS dan Kesos.
 - 7. Peningkatan partisipasi perempuan di masyarakat.
 - 8. Penambahan sarana dan prasarana pendidikan.
 - 9. Menambah SDM (medis, non-medis dan penunjang medis) serta sarana dan prasarana kesehatan khususnya di RSUD Pelabuhanratu dan Jampangkulon
 - 10. Peningkatan koordinasi dalam penanggulangan bencana daerah;
 - 11. Peningkatan pengetahuan kepada masyarakat dalam menghadapi bencana daerah jika sewaktu-waktu terjadi.
 - 12. Menurunkan jumlah kawasan perumahan kumuh.
 - 13. Merwujudkan rumah layak huni.
- b. Strategi yang perlu dikembangkan dalam pengendalian kemiskinan di Kabupaten Sukabumi
 - 1. Menambahkan peralatan latihan kerja dan menambah instruktur yang berkualitas.
 - 2. Pengendalian pertumbuhan penduduk
 - 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kelompok tani maupun aparatur pemerintah yang ada agar mampu memanfaatkan SDA sesuai dengan potensi lokal dan kondisi lingkungan setempat.
 - 4. Menambah sumber penyediaan irigasi yang cukup untukantisipasi musim kemarau.

5. Peningkatan kebersihan kandang dan mengantisipasi virus H5N1.
6. Penambahan tenaga penyuluh pertanian.
7. Penambahan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.
8. Pengendalian alih fungsi lahan produktif.
9. Peningkatan anggaran penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
10. Meningkatkan minat generasi muda untuk menekuni bidang pertanian
11. Penyediaan lahan untuk keperluan pendidikan,
12. Peningkatan penanggulangan bencana daerah
13. Pengalokasian dana pendidikan dan kesehatan,
14. Menambah tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan.
15. Peningkatan pelaksanaan program penanggulangan bencana daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
16. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup sehat,
17. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Saran

Adapun saran yang diajukan dalam program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Upaya penanggulangan kemiskinan harus dimaknai sebagai usaha bersama, di mana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah harus didukung pula dengan peran serta masyarakat dan sektor swasta. Selama penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh satu pihak saja, maka tingkat keberhasilan cenderung kurang optimal. Karena itu partisipasi masyarakat miskin yang paling mengetahui kebutuhan orang miskin tidak semata-mata menjadi obyek saaja tapi keterlibatannya hendaklah sebagai subyek yang akan lebih mendukung keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.
- b. Pendekatan penanggulangan kemiskinan sudah bukan jamannya lagi berorientasi proyek, tetapi hendaklah berorientasi pada program dimana pendekatan hasil (output) bukanlah segala-galanya tapi pendekatan proses juga harus lebih dipentingkan.
- c. Walaupun sudah banyak program penanggulangan kemiskinan diluncurkan baik oleh lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan, dan banyak biaya yang dianggarkan untuk biaya penanggulangn, akan tetapi faktanya jumlah penduduk miskin masih tinggi, dan penduduk rentan miskin juga relatif tinggi, karena itu diperlukan keterpaduan semua pihak agar dalam penanggulangan kemiskinan mendapatkan hasil yang optimal.
- d. Agar penanggulangan kemiskinan dapat lebih optimal, diperlukan sebuah pedoman dan acuan khusus yang memadukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dan agar pedoman tersebut tidak sekedar arsip saja, maka akan lebih berarti jika dituangkan dalam Perda tersendiri, sehingga dokumen itu akan bersifat tetap dan mengikat setiap orang serta memberikan konsekuensi hukum bagi yang tidak melaksanakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2006 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, Sutrisno. 1991. *Methodology Research*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hafsah, Mohammad Jafar. 1999. *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Institute for Religius and Institutional Studies (IRIS) Press. Bandung.
- Jusman, Iskandar. 1999. *Teori dan Isu Pembangunan*. Program Pascasarjana UNIGA. Garut.
- Kabupaten Sukabumi Dalam Angka Tahun 2012. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi.
- Moleong, J Lexy. 1989. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nazir, Moh. 2005. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasution, S. 1993. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Salusu, J,. 1999. *Pengambilan Keputusan Strategi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Supriatna, Tjahya. 1997. *Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suradinta, Ermaya. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta.
- Todaro, Michael P. 1994. *Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga. Edisi Keempat Jilid* Jakarta: Erlangga
- Winardy, Nisar. 1997. *Manajemen Strategi*: Bandung: CV. Mandiri Maju
- Sukabumikab.bps.go.id/index.php/penduduk-dan-tenaga-kerja

Lain-lain

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2013, Sekretariat Daerah pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014
- Kabupaten Sukabumi Dalam Angka Tahun 2011, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sukabumi
- Kabupaten Sukabumi Dalam Angka Tahun 2012, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sukabumi
- Kabupaten Sukabumi Dalam Angka Tahun 2013, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sukabumi.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERSAMPAHAN DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEINDAHAN KOTA MAKASSAR

Oleh: **Baiq Aprimawati**
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstract

In several cities generally waste management is provided by Jakarta the city cleansing. Community involvement and private parties in dealing with waste in several cities have been done to some types of activities. Many community sector involved in collecting the garbage in the heap of garbage, while the providers are generally manage waste in an elite area where paying ability from the customers is already quite high. In the conduct of waste service, the government of Makassar will stipulate policies the region about waste fees or hygiene.

Key words: *community, policies, service*

PENDAHULUAN

Sampah merupakan tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan, sedangkan masyarakat hanya berperan sebagai produsen sampah. Bila terjadi permasalahan dalam penanganan sampah (sampah tidak terangkut) masyarakat cenderung menyalahkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, padahal masyarakat dapat ikut berperan dalam pengelolaan sampah. Masyarakat sebagai produsen sampah dapat berpartisipasi dalam mengurangi jumlah sampah, memilah sampah dan mengolah kembali menjadi barang yang berguna. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan kota yang bersih.

Pertambahan jumlah penduduk kota tentunya akan diikuti dengan segala kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang beragam, yang akan mendorong pula pada pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kota. Jika pemenuhan kebutuhan pelayanan kota kurang baik, maka akan muncul berbagai permasalahan sosial yang dapat mempengaruhi kualitas tingkat kehidupan masyarakat seperti kondisi permukiman dan kesehatan yang buruk. Kesemuanya ini memerlukan pembenahan dan penyempurnaan terhadap institusi (struktur organisasi) yang sudah ada, sehingga memiliki sumber daya manusia dengan etos kerja yang baik, norma dengan nilai-nilai yang tegas di masyarakat sebagai kontrol sosial serta memiliki keterkaitan antara fasilitas pendukung dan personil serta implementasi peraturan perundang-undangan yang ada.

Rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah kabupaten dan kota. Dengan adanya otonomi, kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah. Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat menjadi lebih responsif dalam menanggapi berbagai masalah yang berkembang di daerahnya sehingga program-program pembangunan menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di daerah. Apalagi otonomi daerah juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan

daerah. Dengan kondisi seperti ini, program dan kebijakan pemerintah kabupaten dan kota akan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat kota yang sangat penting adalah pelayanan persampahan. Pemerintah kota melalui konsep otonomi daerah memiliki kewenangan besar dalam menetapkan kebijakan termasuk kebijakan dalam pelayanan persampahan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah kotanya masing-masing. Pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan persampahan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pada beberapa kota umumnya pengelolaan persampahan dilakukan oleh dinas kebersihan kota. Keterlibatan masyarakat maupun pihak swasta dalam menangani persampahan pada beberapa kota sudah dilakukan untuk beberapa jenis kegiatan. Masyarakat banyak yang terlibat pada sektor pengumpulan sampah di sumber timbunan sampah, sedangkan pihak swasta umumnya mengelola persampahan pada kawasan elit dimana kemampuan membayar dari konsumen sudah cukup tinggi.

Umumnya dinas kebersihan selain berfungsi sebagai pengelola persampahan kota, juga berfungsi sebagai pengatur, pengawas, dan pembina pengelola persampahan. Sebagai pengatur, Dinas Kebersihan bertugas membuat peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh operator pengelola persampahan. Sebagai pengawas, fungsi Dinas Kebersihan adalah mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan yang telah dibuat dan memberikan sanksi kepada operator bila dalam pelaksanaan tugasnya tidak mencapai kinerja yang telah ditetapkan, fungsi Dinas Kebersihan sebagai pembina pengelolaan persampahan, adalah melakukan peningkatan kemampuan dari operator. Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui pelathan-pelatihan maupun menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik atas pelayanan pengelolaan persampahan.

Tumpang tindihnya fungsi-fungsi tersebut menjadikan pengelolaan persampahan mejadi tidak efektif, karena sebagai pihak pengatur yang seharusnya mengukur kinerja kebersihan pengelolaan sampah dan akan menerapkan sanksi bila pihak operator tidak dapat dilakukan karena pihak operator tersebut tidak lain adalah dirinya sendiri. Dengan demikian kinerja operator sulit diukur dan pelayanan cenderung menurun.

Untuk Kota Makassar, pelayanan persampahan diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah Kota Makassar tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar. Penyelenggaraan pelayanan persampahan, pemerintah Kota Makassar menetapkan kebijakan pemerintah daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan. Dalam kebijakan ini, ditetapkan dua jenis pelayanan, *pertama*, pelayanan komunal (pelayanan tidak langsung) yakni pengangkutan sampah oleh Pemerintah Kota dari TPS atau Kontainer ke TPA atau tempat pemusnahan sampah yang dikumpulkan sendiri oleh masyarakat ke tempat TPS atau Kontainer dikenakan retribusi sbesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bulan per rumah tangga. *Kedua*, pelayanan individual (pelayanan langsung) yakni pengambilan sampah langsung pada persil atau bangunan selanjutnya diangkut ke TPA untuk dimusnahkan oleh Pemerintah Kota dikenakan retribusi per bulan dengan memperhatikan jumlah produksi sampah. Dalam kenyataannya, baik pelayanan komunal maupun pelayanan individual

tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh kebijakan pemerintah daerah. Hal ini ditandai masih adanya sisa sampah yang tidak terangkut sebesar 386,62m³ atau 12,8% per harinya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah.
2. Bagaimana pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan Kota Makassar.

TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah.
2. Untuk mengetahui pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan Kota Makassar.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Aspek keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari dalam kaitannya dengan pengembangan konsep-konsep ilmu administrasi khususnya dalam implementasi kebijakan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan sebagai bahan rekomendasi dalam peningkatan pelayanan persampahan atau kebersihan pada Kantor Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian kualitatif dilakukan pada empirik secara mendalam, tetapi tidak meluas, untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang bersifat konkrit, spesifik, dan lokus, sedangkan teknik penilaian yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah dapat ditentukan antara: studi kasus, studi sejarah, studi etnologi, studi fenomenologi atau studi grounded. (Rusidi, 2006: 4).

Penelitian eksploratif deskriptif merupakan penelitian nonhipotesis yang bertujuan menggambarkan keadaan atau status fenomena, dimana peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu. (Arikunto 1998: 245).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar merupakan salah satu kota dan sebagai Ibu Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki luas wilayah 176,77km², terletak pada koordinat 0,12 derajat - 8 derajat Lintang Selatan dan 116,48 derajat – 122,36 derajat Bujur Timur, jumlah penduduk 287.184 jiwa. Kota Makassar memiliki

14 Kecamatan dan 143 Kelurahan berbatasan dengan Kabupaten dan Kota:

- Utara : Kota Pare-Pare
- Selatan : Kabupaten Goa
- Barat : Kabupaten Maros
- Timur : Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan pencatatan Stasiun Klimatologi, rata-rata temperatur di Kota Makassar dan sekitarnya sepanjang tahun 2014 sekitar 27^o s.d. 34,7^o Celsius.

Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam Pengelolaan Sampah

Peyelenggaraan pelayanan persampahan pemerintah daerah Kota Makassar berdasarkan kebijakan pemerintah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan, dalam kebijakan ini pemerintah daerah Kota Makassar menetapkan dua jenis kebijakan pelayanan persampahan atau kebersihan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pelayanan Komunal (Kebijakan Pelayanan tidak Langsung)

Yakni pengangkutan sampah oleh pemerintah kota dari TPS atau kontainer ke TPA yang dikumpulkan sendiri oleh masyarakat ke TPS atau kontainer dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bulan per rumah tangga.

2. Kebijakan Pelayanan Individual (Kebijakan Pelayanan Langsung)

Yakni pengambilan sampah langsung pada persil atau bangunan selanjutnya diangkut ke TPA untuk dimusnahkan oleh pemerintah kota dikenakan retribusi per bulan dengan memperhatikan jumlah produksi sampah.

Dalam kenyataannya, baik kebijakan pelayanan komunal maupun kebijakan pelayanan individual tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh kebijakan pemerintah daerah Kota Makassar. Hal ini ditandai masih adanya sisa sampah yang tidak terangkut sebesar 368,62 M³ atau 12,81% per harinya.

Pelayanan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kota Makassar

Untuk Kota Makassar pelayanan persampahan diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah Kota Makassar tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar.

Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun akan meningkatkan pula permasalahan dalam pengelolaan wilayah kota, khususnya masalah produksi sampah. Adapun jumlah penduduk pada Tahun 2011 adalah 1.100.019 jiwa, pada Tahun 2012 adalah 1.160.011 jiwa dan pada Tahun 2013 tercatat 1.179.023 jiwa (BPS, Kota Makassar 2014). Berikut tabel cakupan pelayanan persampahan menurut sumber sampah di Kota Makassar.

Tabel 1
Cangkupan Pelayanan Persampahan di Kota Makassar

Sumber	Sampah (M³/Hari)	Sampah Terangkut (M³/Hari)
Pemukiman		
• Mewah	234,56	227,38
• Menengah	334,20	282,40
• Sederhana	1.208,90	1.054,04
Sarana Kota		
• Pasar	578,00	496,56
• Kawasan Perniagaan	138,54	122,66
• Kawasan Perkotaan	121,65	112,85
• Kawasan Pendidikan	84,60	69,04
• Terminal	88,00	76,73
• Pelabuhan	96,00	81,24
• Bandara	-	-
• Hotel	65,70	55,54
• Rumah sakit	84,00	62,73
• Sarana Ibadah	46,00	40,11
• Kawasan Industri	72,00	62,09
• Perairan Terbuka	324,00	283,99
• Sapuan Jalan dan Taman	104,00	94,17
Jumlah	3.508,15	3.121,53

Sumber: Makassar Dalam Angka 2014

Dari 386,62 M³ atau 12,81% sisa sampah yang tidak terangkut setiap hari menjadi permasalahan besar terhadap kebersihan Kota Makassar. Pemerintah kota dituntut untuk terus meningkatkan pelayanan persampahan seiring dengan semakin meningkatnya pula produksi sampah dari hari ke hari.

Fakta Empirik

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Alat	Jumlah (Unit)
1.	Sarana angkutan sampah:	
	• Mobil	
	Lebih 20 tahun	14
	Lebih 10 tahun	23
	Lebih 5 tahun	52
	Kurang 5 tahun	18
	• Motor tiga roda	14
	• <i>Kontainer</i>	139
	• <i>Bekhoe loader</i>	3
	• <i>Whell excavator</i>	1

2.	Sarana pengelola TPA: • <i>Buldozer D 65</i> • <i>Buldozer D 31</i> • <i>Excavator PC 200</i>	2 1 1
3.	Sarana pengelolaan RTH: • Mobil tangki • Mobil tangga • Mobil pangkas rumput • Mesin rumput	4 2 1 26

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar Tahun 2014

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa alat angkut persampahan usianya rata-rata lebih tua dan masih sedikit alat angkut yang usianya muda, dilihat dari jumlahnya untuk mengelola satu kota masih kurang memadai.

b. Kondisi Kepegawaian

Pegawai yang terlibat dalam pengelolaan persampahan atau kebersihan di Kota Makassar dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Kondisi Kepegawaian Penanganan Persampahan di Kota Makassar

No.	Jenis Pegawai	Jumlah (orang)
1.	Menurut status: • Pegawai organik • Pegawai kontrak	310 462
2.	Menurut bidang pekerjaan: • Pekerja angkutan sampah • Pekerja selokan • Pekerja penyapuan • Bengkel • TPA • Pekerja taman • Pekerja pemakaman • Staf administrasi	255 19 102 20 20 111 42 103
Jumlah		772

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar Tahun 2014

Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam Pengelolaan Sampah

Kebijakan pemerintah daerah Kota Makassar tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan masih berlaku, selama ini belum ada kebijakan terbaru yang diberlakukan. Objek Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga, bangunan institusional industri perdagangan. Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan yang memanfaatkan, menikmati pelayanan dimaksud.

Golongan Retribusi Persampahan adalah golongan jasa umum. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan atau kebersihan dilakukan sebagai berikut:

1. Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan atau kebersihan didasarkan atas kuantitas penggunaan jasa dengan prinsip subsidi silang dalam rangka menanggulangi beban biaya yang dipikul daerah.
2. Alokasi beban biaya meliputi kegiatan operasional pengadaan fasilitas sarana dan prasarana serta jasa pelayanan persampahan atau kebersihan.
3. Penggunaan jasa dapat diberi tingkatan pelayanan dengan memperhatikan kualitas pelayanan sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku.
4. Penggunaan jasa dihitung dengan cara mengalihkan tariff retribusi dengan tingkat penggunaan jasa oleh masyarakat dan ditetapkan secara harian atau bulanan, dan atau pertahun.

Berdasarkan data sekunder yang penulis peroleh serta hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengolahan Lingkungan dan Keindahan Kota Makassar, maka besaran tarif Retribusi Persampahan atau Kebersihan di Kota Makassar secara garis besar dibagi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan Komunal (Pelayanan Tidak Langsung)
Pengangkutan sampah oleh Pemerintah Daerah dan TPS atau kontainer ke TPA tempat pemusnahan sampah yang dikumpulkan sendiri oleh masyarakat ke TPS atau Kontainer dilakukan Retribusi sebesar Rp. 15.000,-.
2. Pelayanan Individual (Pelayanan Langsung)
Pengambilan langsung pada persil atau bangunan selanjutnya diangkut ke TPA untuk dimusnahkan oleh Pemerintah Daerah dikeluarkan Retribusi perbulan dengan memperhatikan jumlah produksi sampah.
3. Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Komunal
 - a. Pengangkutan sampah oleh Pemerintah Daerah di Pasar dan Terminal.
 - b. Pengangkutan oleh Pemerintah Daerah ke TPA.
 - c. Penjualan tidak menetap.
 - d. Bagi yang membuang sampah langsung ke TPA.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Retribusi persampahan di Kota Makassar besaran biaya telah ditetapkan melalui kebijakan pemerintah dengan memperhatikan jenis produksi sampah menjadi tiga bagian besar yaitu Komunal, Individual, dan Komunal yang memperhatikan besaran produksi per meter kubik. Pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Makassar merupakan kebijakan pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Pelayanan Persampahan atau Kebersihan dalam kota dilaksanakan oleh
 - a. Pemerintah Daerah dibantu oleh LMD (Lembaga Masyarakat Desa).
 - b. LMD dibawah koordinasi Lurah dan Camat.
 - c. Lurah dan Camat mengikuti petunjuk Walikota.
2. Untuk kegiatan pelayanan persampahan atau kebersihan, Walikota dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga. Bentuk kerjasama diputuskan oleh Keputusan Walikota.

Pelayanan Pengelolaan Persampahan atau Kebersihan

Perencanaan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Makassar berdasarkan hasil wawancara mencakup dua program yaitu:

- a. Program Utama
 1. Pembangunan kinerja pengelolaan persampahan.
 2. Pengembangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
 3. Pengembangan kualitas akses informasi sumber daya alam lingkungan hidup.
 4. Peningkatan pengendalian polusi.
 5. Pengelolaan ruang terbuka hijau.
 6. Pengelolaan areal pemakaman.
- b. Program Pendukung
 1. Pelayanan administrasi perkantoran.
 2. Peningkatan sarana dan prasarana kantor.
 3. Peningkatan disiplin aparatur.
 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.
 5. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Kegiatan pelayanan persampahan dan atau kebersihan di Kota Makassar berdasarkan timbunan sampah per meter kubik per hari yang dapat terangkut sekitar 87,97% dan masih tersisa per hari sekitar 12,13%. Hal ini secara umum, pelayanan persampahan dan atau kebersihan di Kota Makassar dapat dikategorikan baik. Namun, sisa per hari sekitar 12,13% harus diantisipasi bila beberapa hari saja tidak terangkut akan membekak timbunan sampah.

Kendala yang dihadapi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar tentang persampahan secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak ada keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan kebutuhan dalam pengelolaan kebersihan.
2. Usia alat berat sebagai pendukung pengelola TPA di atas lima tahun.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penempatan sampah pada tempatnya.
4. Masih terbatasnya lahan TPA.
5. Kurangnya ruang terbuka hijau.
6. Lahan pemakaman untuk umat Kristen sudah penuh.
7. Laju pembangunan yang pesat berdampak pada perubahan kondisi lingkungan.
8. Perubahan iklim global, menurunnya kualitas air dan udara.

SIMPULAN

1. Kebijakan pemerintah daerah Kota Makassar tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan masih berlaku, selama ini belum ada kebijakan terbaru yang diberlakukan. Kebijakan pemerintah telah dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

Keindahan Kota Makassar sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Dinas tersebut yang dituangkan melalui kebijakan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan persampahan atau kebersihan di Kota Makassar.

2. Kebijakan pemerintah Kota Makassar kualitas pelayanan persampahan atau kebersihan realisasi program kegiatannya berdasarkan kondisi pada permasalahan kepegawaian berjumlah 772 orang masih kurang untuk mengelola persampahan di sebuah kota. Kondisi lainnya sarana dan prasarana sangat minim tentunya kurang memadai dimana alat berat rata-rata usianya lebih dari 10 tahun.

SARAN

1. Kebijakan pemerintah perlu ditinjau ulang mengingat kondisi masyarakat semakin maju, tidak menutup kemungkinan untuk merubah atau membuat kebijakan baru kembali sehingga kekurangan dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat ditindaklanjuti dan diadopsi kekurangannya pada kebijakan selanjutnya.
2. Kualitas pelayanan persampahan atau kebersihan di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar akan semakin baik bila ditunjang oleh jumlah pegawai, sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini sangat perlu mengingat kondisi masyarakat kita semakin banyak/bertambah apalagi pengaruh global yang cenderung berdampak pada lingkungan di masyarakat. Tokoh masyarakat perlu dilibatkan dalam penanganan dan pengelolaan sampah agar masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yayasan Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Moleong Lexi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Jakarta, Bandung, 2002.
- Nasution S, *Metode Research*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Riduan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2003.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Wasistiono Sadu, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2002
- _____, *Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2002.
- _____, *Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2002.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

PEDOMAN BAGI PENULIS

1. Widyapraja menerima sumbangan artikel berupa hasil penelitian lapangan, hasil studi kepustakaan, kajian teori maupun gagasan konseptual.
2. Naskah merupakan karya tulis asli dan belum pernah dipublikasikan.
3. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia baku, baik dan benar serta sederhana dan mudah dimengerti. Hindari pemakaian bahasa asing, kecuali bila sangat diperlukan dan penulisannya diketik miring atau diberi garis bawah termasuk bahasa asing bermakna teknis atau kata yang belum diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.
4. Naskah ditulis secara sistematis, objektif dan rasional berdasarkan lingkup keilmuan pemerintahan yang memuat Pendahuluan (Latar belakang, ruang lingkup, maksud dan tujuan), Pembahasan (Tinjauan pustaka dan analisis), Penutup (Kesimpulan dan saran), Daftar Pustaka.
5. Halaman naskah paling sedikit 12 halaman dan paling banyak 15 halaman, diketik 2 spasi, kertas kwarto A4, dan dapat dikirim melalui email.
6. Naskah dilengkapi dengan abstrak yang panjangnya antara 150 - 200 kata, diketik 1 (satu) spasi dan dilengkapi dengan kata kunci.
7. Pengiriman naskah disertai dengan nama pengarang, alamat tugas pengarang, nomor telepon dan alamat email pengarang.
8. Materi naskah bukan merupakan tanggung jawab redaksi, redaksi berhak mengedit redasional tanpa mengubah arti.

Redaksi Widyapraja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Kampus IPDN Cilandak Jl. Ampera Raya Cilandak Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12650
Telp/Fax : 021 782 1843
email: jurnalwidyaprajaipdn@yahoo.com & andi_pro23@yahoo.com